LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

TAHUN 2023



KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 JATIKALEN 64392

EMAIL : jatikalen@nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatikalen Tahun 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Jatikalen dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Jatikalen. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, Januari 2024

CAMAT JATIKALEN

KHAIRUL ANAM, S.Pd, M.M

Pembina

NIP. 19670514 198701 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum/Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
    A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)
    A.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
    A.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra
    A.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasiona (Minimal dengan Regional/ Propinsi/Kabupaten Yang Berbatasan)
    A.1 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
    A.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
    A.1 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun Berkenaan
B. Laporan Hasil Penilaian Sinergitas Tahun 2023
C. Laporan Hasil SKM Tahun 2023
D. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023
E. Laporan Epdeskel Tahun 2022
F. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
G. Laporan Tribulan (LAPTRI) Tahun 2023
H. Laporan Evaluasi Perencanaan Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM/LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP

Kecamatan Jatikalen Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Jatikalen bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Jatikalen merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

B. Landasan Hukum

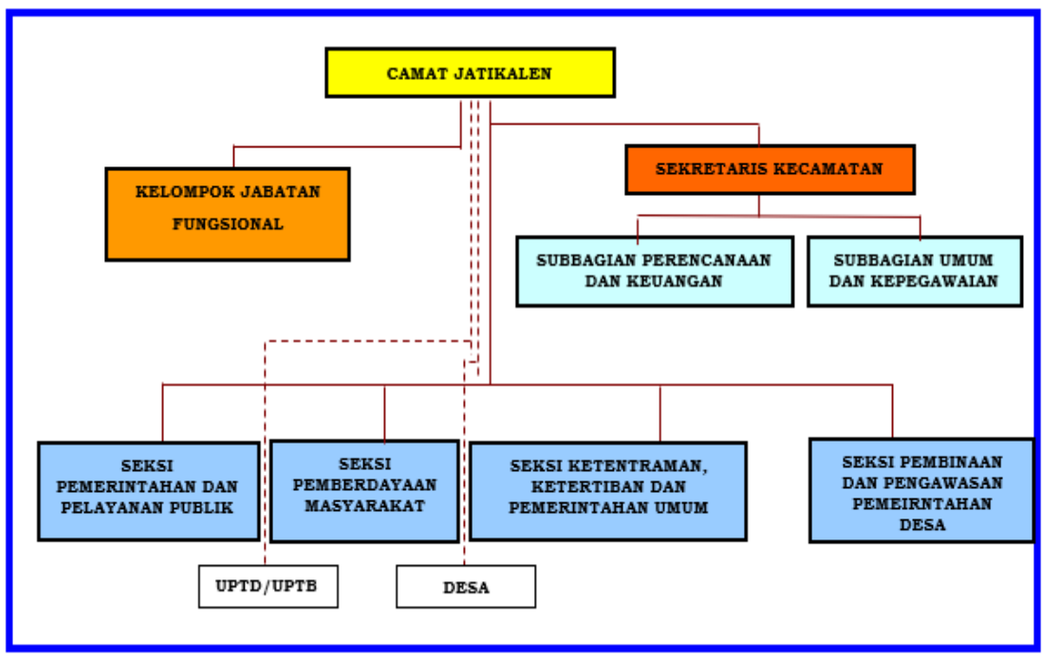
1. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

C. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

   Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Jatikalen adalah Kecamatan dengan Tipe A.

   Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



2. Tugas dan Fungsi

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Jatikalen.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
   i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Kecamatan Jatikalen pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Jatikalen sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi	1	2	3
4.	Kasubbag	1	1	2
5.	Pelaksana/PNS	2		2
6.	Non ASN	2	3	5
Jumlah				14

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Jatikalen sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1	1	2
2.	Penata Tingkat I	III/d	3		3
3.	Penata	III/c		1	1
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
5.	Pengatur	II/c	1		1
Jumlah					9

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Jatikalen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	1	3
2.	S1	2	2	4
3.	D3	1	2	3
4.	SMA	3	1	4
	JUMLAH			14

I. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Jatikalen diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023, antara lain :

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
c. Pelayanan Prima
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Jatikalen terdapat beberapa pemasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang;
2. Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib;

3. Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.

J. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum/Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
   A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n
   A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
   A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Propinsi/Kabupaten Yang berbatasan)
   A.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
   A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
   A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan
   Indikator : Nilai Sakip Kecamatan
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
   Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Jatikalen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan

perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen 2023 disusun berdasar Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.551.548.040 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Jatikalen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2023, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Jatikalen menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat

katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik	74,42	100%
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Kinerja Tahun 2023**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81	87,21	107,66 %
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70	74,65	106,64 %
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88	81%	92,04 %

Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, adapun analisa dari 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan dari Kecamatan Jatikalen diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

SASARAN STRATEGIS 1

Untuk dapat mencapai sasaran strategis pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya, dan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya SDM di Kecamatan Jatikalen.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Jatikalen

TUJUAN Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik					
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2023(%)	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	%	Baik	81	87,21	107,66

Analisa Atas Capaian Indikator Sasaran Strategis Ke-1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 terealisasi dengan nilai 87,21 atau dengan kategori “baik” dari target yang ditetapkan 81 sehingga persentase capaiannya sebesar 107,66 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mencapai sasaran.

Nilai IKM dapat diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I (periode Januari 2023 s.d Maret 2023) dengan jumlah responden 115 orang, Tribulan II (periode April 2023 s.d. Juni 2023) dengan jumlah responden 89 orang, Tribulan III (periode Juli 2023 s.d. September 2023) dengan jumlah responden 48 orang, dan Tribulan IV (periode Oktober s.d. Desember 2023) dengan jumlah responden 220 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui handphone masing-masing responden. Dan responden harus mengisi kuisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

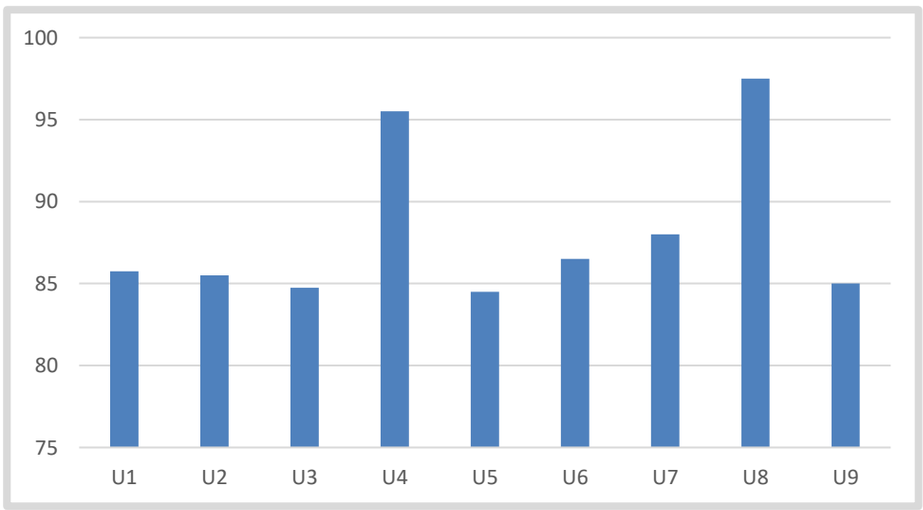
Tabel 3.1.4

Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	84,08	83,18	87,71	90,36

Grafik 3.1

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatikalen Tahun 2023



Keterangan :

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari grafik 3.1 di atas dapat diketahui bahwa ke-9 unsur IKM yang mempunyai hasil terendah adalah pada U5 yaitu Produk Spesifikasi Jenis Layanan. Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Sehingga dari hal itu dapat diketahui bahwa

bagi masyarakat, kepuasan rendah ada pada kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Hasil yang diberikan. Dan ini menurut masyarakat adalah kurang sesuai.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desadan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan

Tabel 3.1.5
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Jatikalen

TUJUAN : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan public					
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2023	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Sakip Kecamatan	%	106,64	70	74,65	106,64 %

Analisa Atas Capaian Indikator Sasaran Strategis Ke-2

Nilai SAKIP Kecamatan Jatikalen tahun 2023 terealisasi dengan nilai 74,65 atau dengan kategori “BB” dari target yang ditetapkan 70 sehingga persentase capaiannya sebesar 106,64 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mencapai sasaran.

Nilai SAKIP Kecamatan Jatikalen Tahun 2023 diperoleh melalui penilaian oleh Tim Penilai SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang hasilnya berupa Berita Acara LHE (Laporan Hasil Evaluasi) penilaian/evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75
	Total	**100%**	**74,65**

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada komponen Pelaporan Kinerja, nilainya paling rendah yaitu 11,10. Hal itu terjadi karena masih belum sempurnanya Laporan Kinerja ASN dan Laporan LKjIP sehingga menyebabkan nilai menjadi rendah.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Tabel 3.1.6
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Jatikalen

TUJUAN : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik					
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2023 (%)	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	%	92,04	88	81%	92,04

Analisa Atas Capaian Indikator Sasaran Strategis Ke-2

Untuk mengetahui persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator/instrument sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa setiap desa diwajibkan untuk mengevaluasi dirinya dalam upaya melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Pemendagri tersebut.

Adapun cara pengisian pada Lampiran II Permendagri tersebut adalah melalui Aplikasi Epdeskel Kemendagri yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.

Jadi desa bisa menjawab setiap pertanyaan langsung secara online di dalam aplikasi Epdeskel Kemendagri. Sehingga hasil penilaiannya akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan langsung bisa diketahui oleh pihak Kecamatan, Kabupaten, hingga Pusat.

Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada di dalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Desa Kurang Berkembang (nilai <= 300)
2. Desa Berkembang (nilai 301-450)
3. Desa Cepat Berkembang (nilai >= 451)

Berikut adalah formulir yang harus diisi oleh Desa, berdasarkan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan, dengan isian antara lain :
    a. Pemerintahan Desa
    b. Kinerja
    c. Inisiatif dan Kreatifitas dalam Pemberdayaan Masyarakat
    d. Desa dan Kelurahan Berbasis Teknologi dan Informasi/E-Government
    e. Pelestarian Adat dan Budaya
2. Bidang Kewilayahan
    a. Identitas Desa dan Kelurahan
    b. Batas
    c. Inovasi
    d. Tanggap dan Siaga Bencana
    e. Pengaturan Investasi

3. Bidang Kemasyarakatan
    a. Partisipasi Masyarakat
    b. Kelembagaan Masyarakat
    c. PKK
    d. Keamanan dan Ketertiban
    e. Pendidikan
    f. Kesehatan
    g. Ekonomi
    h. Penanggulangan Kemiskinan
    i. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan indikator persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di atas, dari 11 desa yang ada pada Kecamatan Jatikalen dari Aplikasi Epdeskel, maka dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Status
1	Perning	201	62	190	453	Cepat Berkembang
2	Ngasem	215	87	192	494	Cepat Berkembang
3	Gondangwetan	150	63	164	377	Berkembang
4	Jatikalen	205	69	181	455	Cepat Berkembang
5	Lumpangkuwik	216	86	190	492	Cepat Berkembang
6	Dlururejo	194	72	184	450	Berkembang
7	Dawuhan	215	76	189	480	Cepat Berkembang
8	Begendeng	200	79	175	454	Cepat Berkembang
9	Pulowetan	210	88	183	481	Cepat Berkembang
10	Munung	221	81	191	493	Cepat Berkembang
11	Pule	198	71	182	451	Cepat Berkembang

Dari data tabel dapat diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Jatikalen, yang mempunyai status desa “Cepat Berkembang” sebanyak 9 desa, sedangkan yang 2 desa lainnya berstatus “Berkembang”. Oleh sebab

itu, dapat dihitung prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan rumus :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{\sum Desa\ Cepat\ Berkembang}{\sum Total\ Desa}\ x\ 100\%$$

Sehingga :

$$\text{Tata Kelola Desa} = \frac{9}{11}\ x\ 100\% = 81\ \%$$

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah sebanyak 81 % atau berdasarkan capaian kinerja sebanyak 92,04 %.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.7
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun (2022, 2021)

No.	Tujuan	Indikator	Target Kinerja			Realisasi KInerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik	Baik	Baik		76,32	74,42
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target Kinerja**			**Realisasi KInerja**		
			2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	80	80,5	81	Baik (80,50)	Baik (79,67)	Baik (87,21)
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	66	68	70	51,37	61,70	74,65

No.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Realisasi KInerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	84	86	88	81	81	81

Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Berdasarkan Tabel 3.1.7 dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022, maka IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Jatikalen mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Jatikalen berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan sebaik mungkin.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Nilai SAKIP di Kecamatan Jatikalen juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini terjadi karena para stakeholder yang terlibat di Kecamatan Jatikalen berusaha untuk memperbaiki dan mencukupi atas kekurangan dokumen-dokumen SAKIP.

Sasaran ke-3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Jika dilihat dari Tabel 3.1.7, maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik belum bertambah prosentasenya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemenuhan dokumen-dokumen yang harus di cukupi oleh desa untuk di upload pada aplikasi epdeskel.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2023) Dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.8.1
Target Kinerja Renstra

No.	Tujuan	Indikator	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2350	2355	Baik	Baik	Baik
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Target Renstra**				
			2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	79	79,5	80	80,5	81
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	62	64	66	68	70
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	80	82	84	86	88

Tabel 3.1.8.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Target Akhir Renstra

No.	Tujuan	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan public	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik	74,42	100%

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemauan (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81	87,21	107,66
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70	74,65	106,64
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88	81	92,04

Tingkat Kemajuan dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{Realisasi\ Kinerja\ Tahun\ 2023}{Target\ Pada\ Akhir\ Renstra}\ x\ 100\%$$

Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Dari Tabel 3.1.8.2 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra hasilnya lebih tinggi dan mempunyai Tingkat Kemajuan sebesar 107,66 %. Hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, sehingga dari tahun ke tahun nilainya selalu mengalami kenaikan/kemajuan.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan

Demikian pula pada Nilai SAKIP Kecamatan Jatikalen. Dari Tahun ke tahun nilai SAKIP Jatikalen selalu mengalami kenaikan/kemajuan. Dan pada Tahun 2023 ini, nilai SAKIP Kecamatan mendapat predikat BB atau 74,65 dan memperoleh peringkat Nomor 2 untuk tingkat Kecamatan. Tingkat kemajuan yang selalu naik dari tahun ke tahun ini tidak luput karena kekompakan dan keseriusan untuk berkomitmen dengan meningkatkan kualitas dokumen dan memperbaiki atas kekurangan dokumen-dokumen SAKIP.

Sasaran ke-3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Meskipun tingkat kemajuan paling rendah dibandingkan pada sasaran yang lain, namun jika dibandingkan dengan Desa di kecamatan lain, prosentase Jumlah Desa yang Cepat Berkembang lebih tinggi nilainya.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Propinsi Jawa Timur

Tabel 3.1.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Propinsi Jawa Timur

No.	Tujuan	Indikator	Standar Propinsi Jawa Timur	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	74,42
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Standar Propinsi Jawa Timur**	**Realisasi Kinerja Tahun 2023**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	87 %	87,21 %
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	91,51	74,65
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	N/A	81%

Berdasarkan Tabel 3.1.9 dapat diketahui bahwa di tahun 2023 pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jatikalen berada sedikit di atas target Propinsi Jawa Timur yaitu selisih 0,21 %, sedangkan pada Nilai SAKIP, untuk Kecamatan Jatikalen berada jauh bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dimana pada Renstra Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa target minimal adalah dengan predikat A. Sedangkan pada Kecamatan Jatikalen predikatnya masih BB.

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.10
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Tingkat Kemauan (%)	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	Tercapai
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Tingkat Kemauan (%)**	**Tercapai/ Tidak Tercapai**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	107,66	Tercapai
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	106,64	Tercapai
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	92,04	Tercapai

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Namun, dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain:

1. Upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi ;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung kegiatan;
3. Menurunnya partisipasi masyarakat di berbagai forum yang diselenggarakan ;
4. Tuntutan terhadap kualitas dan profesionalisme SDM perencana ;

5. Lemahnya pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Dari sasaran kinerja yaitu untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena adanya kerjasama yang kompak dan baik antara berbagai pihak di lingkunagn kecamatan Jatikalen, mulai dari Camat hingga para THL (Tenaga Harian Lepas) sehingga dapat menghasilkan nilai SAKIP yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, karena nilai SAKIP Kecamatan Jatikalen terendah ada pada indikator Pelaporan Kinerja, maka untuk selanjutnya kami akan melakukan perbaikan-perbaikan pada Pelaporan Kinerja pada khususnya dan seluruh Dokumen SAKIP pada umumnya.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar desa menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah dengan adanya pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh:

1. Camat, dalam kegiatan Konferensi Dinas Perangkat Desa dan/atau monev pembinaan di desa
2. Dinas PMD, dalam kegiatan evaluasi tingkat perkembangan desa
3. Inspektorat, dalam kegiatan pemeriksaan desa.

Dari sasaran kinerja untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu dinventarisasi dan di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Permasalahan

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Jatikalen, sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa.

Solusi

Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	80,81	19,19
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Capaian Kinerja (%)**	**Realisasi Anggaran (%)**	**Tingkat Efisiensi**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	107,66	66,75	40,91
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	106,64	95,94	10,7
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	92,04 %	79,74	12,3

Rumus :

Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja tahun 2023 - Prosentase Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran.

Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Dari Tabel 3.1.11 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan prosentase capaian kinerja sebesar 107,66 % dan prosentase penyerapan anggaran sebesar 66,75 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 40,91%.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan

Dari Tabel 3.1.11 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 106,64 % dan prosentase penyerapan anggaran sebesar 95,94 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 10,7 %.

Sasaran ke-3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Dari Tabel 3.1.11 diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prosentase capaian kinerja sebesar 92,04 % dan prosentase penyerapan anggaran sebesar 79,74 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 12,3 %.

A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.12
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**104,25**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**100 %**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	100 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**77,41%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	78,57 %
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	77,77%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**	**82,35%**
			Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang meningkat	100%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur perencana dan peneliti yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47,05%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**95,83 %**
			Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	75%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksanany a Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**100%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksanany a Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik**	**100%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
				Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	100 %
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan**	**100%**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal**	**100%**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	**100%**
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**100%**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
			terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**90,90%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100%**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%
			PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100%**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**	**100%**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**100%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**100%**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %

Dari Tabel 3.1.11 diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 ini di Kecamatan Jatikalen pada programnya mempunyai kinerja hasil kinerja yang sudah bagus yakni diatas 50%. Sedangkan berdasarkan per kegiatan/subkegiatan, maka ada beberapa SubKegiatan yang hasil kinerjanya masih dibawah 50% atau Rendah yakni :

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini terjadi karena OPD Teknis di Kabupaten Nganjuk selaku Leading Sector tidak melaksanakan kegiatan pelatihan sehingga hasil kinerja tidak tercapai maksimal
- Kegiatan Administrasi Umum Perangakt Daerah SugKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Hal ini terjadi karena frekuensi dan volume cetakan dan penggandaan sedikit, sehingga kinerja tidak tercapai maksimal

3.2 REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Jatikalen pada Tahun 2023 melaksanakan 6 (enam) program dan dua puluh tiga kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan pagu sebesar Rp2.551.548.040 dengan realisasi sebesar Rp1.766.858.290 atau dengan capaian sebesar 69,25 %. Adapun rincian realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.306.298.590**	**1.539.326.640**	**766.971.950**	**66,75**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3,420,000**	**3,412,000**	**8,000**	**99.77**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3,420,000	3,412,000	8,000	99.77

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
	Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1,897,823,990**	**1,225,808,750**	**672,015,240**	**64.59**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,894,859,990	1,222,874,750	671,985,240	64.54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	684,000	660,000	24,000	96.49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,280,000	2,274,000	6,000	99.74
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**26,150,000**	**20,602,000**	**5,548,000**	**78.78**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9,050,000	7,182,000	1,868,000	79.36
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	1,500,000	3,500,000	30.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**120,105,700**	**84,384,355**	**35,721,345**	**70.26**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,913,800	12,876,500	37,300	99.71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,918,900	34,237,775	17,681,125	65.94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,678,000	4,708,580	4,969,420	48.65
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,360,000	11,270,000	90,000	99.21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29,060,000	17,791,500	11,268,500	61.22
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,175,000	3,500,000	1,675,000	67.63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**46,936,200**	**39,850,000**	**7,086,200**	**84.90**
	Pengadaan Mebel	20,936,200	14,000,000	6,936,200	66.87
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,000,000	25,850,000	150,000	99.42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**74,042,000**	**44,955,075**	**29,086,925**	**60.72**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,792,000	29,020,409	2,771,591	91.28
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,250,000	15,934,666	26,315,334	37.72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**137,820,700**	**120,314,460**	**17,506,240**	**87.30**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62,133,300	61,196,660	936,640	98.49
	Pemeliharaan Peralatan	8,050,000	8,025,000	25,000	99.69

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
	dan Mesin Lainnya				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67,637,400	51,092,800	16,544,600	75.54
	TOTAL	**2,306,298,590**	**1,539,326,640**	**766,971,950**	**66.74**
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**37.383.850**	**37.262.850**	**121.000**	**99,68**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**27,850,300**	**27,806,500**	**43,800**	**99.84**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27,850,300	27,806,500	43,800	99.84
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**1,123,350**	**1,123,350**	**0**	**100.00**
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1,123,350	1,123,350	0	100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**8,410,200**	**8,333,000**	**77,200**	**99.08**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8,410,200	8,333,000	77,200	99.08
	TOTAL	**37,383,850**	**37,262,850**	**121,000**	**99.68**
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**39.880.550**	**38.067.200**	**1.813.350**	**95,45**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**39,880,550**	**38,067,200**	**1,813,350**	**95.45**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,102,800	11,076,500	1,026,300	91.52
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27,777,750	26,990,700	787,050	97.17
	TOTAL	**39,880,550**	**38,067,200**	**1,813,350**	**95.45**
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**22.412.800**	**21.260.300**	**1.152.500**	**94,86**
	Koordinasi Upaya	**22,412,800**	**21,260,300**	**1,152,500**	**94.86**

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	22,412,800	21,260,300	1,152,500	94.86
	TOTAL	**22,412,800**	**21,260,300**	**1,152,500**	**94.86**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**105.965.350**	**99.359.300**	**6.606.050**	**93,77**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**105,965,350**	**99,359,300**	**6,606,050**	**93.77**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	105,965,350	99,359,300	6,606,050	93.77
	TOTAL	**105,965,350**	**99,359,300**	**6,606,050**	**93.77**
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**39.606.900**	**31.582.000**	**8.024.900**	**79,74**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**39,606,900**	**31,582,000**	**8,024,900**	**79.74**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30,596,700	26,785,000	3,811,700	87.54
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9,010,200	4,797,000	4,213,200	53.24
	TOTAL	**39,606,900**	**31,582,000**	**8,024,900**	**79.74**
	TOTAL KESELURUHAN	**2,551,548,040**	**1,766,858,290**	**784,689,750**	**69.25**

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Jatikalen dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Meningkatkan perencanaan anggaran dan rencana aksi kegiatan yang lebih focus dan tepat sasaran
b. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut setiap tribulan

c. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Jatikalen secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
e. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatikalen Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) KecamatanJatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 kami susun dalam rangka mempertanggungjkawabkan implementasi SAKIP pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Jatiaklen selama tahun anggaran 2023 kepada Bapak Bupati Nganjuk.

Nganjuk, Januari 2024
CAMAT JATIKALEN

KHAIRUL ANAM, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19670514 198701 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Laporan Hasil Penilaian Sinergitas Tahun 2023
3. Laporan Hasil SKM Tahun 2023
4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023
5. Laporan Epdeskel Tahun 2022
6. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA) TA.2023
7. Laptri
8. Laporan Evaluasi Perencanaan Daerah

PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JATIKALEN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 KODE POS 64392

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
Jalan Raya Jatikalen Nomor 23 Email : jatikalen@nganjukkab.go.id
JATIKALEN - 64392

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWITO RAHARJO, S.H., M.M.

Jabatan : CAMAT JATIKALEN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Jabatan : Plt. BUPATI NGANJUK

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK	**CAMAT JATIKALEN**
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA	**SUWITO RAHARJO, SH, MM**
	Pembina Tingkat 1
	NIP. 19651025 198603 1 020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JATIKALEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88

	Program	**Anggaran**	**Keterangan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.301.937.450	APBD TA.2023
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.56.268.850	APBD TA.2023
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.37.380.550	APBD TA.2023
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.17.112.800	APBD TA.2023
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.105.965.350	APBD TA.2023
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.44.331.900	APBD TA.2023

Nganjuk, Januari 2023

Plt.BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA

CAMAT JATIKALEN

SUWITO RAHARJO, SH, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19651025 198603 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1 Nganjuk Telp.No. (0358) 323388
Email : www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 07 November 2023

Nomor	:	100/3242/411.000/2023	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Tahun 2023	di N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi dan Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/35289/011.1/2023 tanggal 15 September 2023 hal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisioner.

C. Hasil Penilaian

1. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 masih ada indikator yang belum disetujui dikarenakan :
    a. Format data dukung belum sesuai;
    b. Data dukung belum sesuai dengan isian indikator yang dimasukan; dan
    c. Data dukung belum dilengkapi dengan narasi yang jelas tempat dan tanggal dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	SINCAN	INDIKATOR MANAJERIAL	RATA-RATA	RANKING
1	NGANJUK	84,82	89,25	87,03	1
2	BAGOR	85,33	88,00	86,66	2
3	PRAMBON	85,35	86,75	86,05	3
4	BERBEK	86,56	85,00	85,78	4
5	WILANGAN	79,85	89,50	84,68	5
6	NGETOS	93,70	75,50	84,60	6
7	SUKOMORO	87,24	81,75	84,49	7
8	TANJUNGANOM	87,46	79,25	83,36	8
9	KERTOSONO	70,62	95,00	82,81	9
10	NGLUYU	81,74	83,50	82,62	10
11	LENGKONG	84,69	80,00	82,35	11
12	SAWAHAN	85,30	76,50	80,90	12
13	REJOSO	74,71	86,75	80,73	13
14	NGRONGGOT	76,19	85,25	80,72	14
15	PACE	85,06	76,25	80,65	15
16	PATIANROWO	80,84	79,75	80,29	16
17	BARON	78,50	80,25	79,37	17
18	LOCERET	84,69	73,50	79,10	18
19	GONDANG	73,74	78,50	76,12	19
20	JATIKALEN	72,10	76,75	74,42	20

C. Rekomendasi

1. Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi sebagaimana huruf C angka 1 diatas berupa catatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) harus ditindaklanjuti oleh Camat paling lambat sebelum Tahun Anggaran 2023 berakhir.
2. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar :
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.

3. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaporkan perbulan oleh penyusun per Tri Wulan (3 bulan) dan di verifikasi oleh Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian serta dilaporkan oleh Sekretaris Camat dan Camat per semester (6 bulan).
4. Untuk pengisian hasil kinerja Tahun 2023 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai Januari 2024, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Pj. Bupati Nganjuk (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN SKM TAHUN 2023

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	3	3	2	4	3	3	3	4	2			Perempuan
2	3	3	3	4	3	3	3	3	2			Perempuan
3	3	3	3	4	3	3	3	3	2			Perempuan
4	3	3	3	4	3	3	4	4	3			Laki-Laki
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4			Laki-Laki
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4			Laki-Laki
7	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Laki-Laki
8	2	1	2	4	3	3	3	4	3			Laki-Laki
9	4	4	4	4	3	4	3	4	3			Laki-Laki
10	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Laki-Laki
11	3	3	4	4	3	3	3	3	3			Laki-Laki
12	3	3	3	4	3	3	4	4	3			Laki-Laki
13	3	3	3	3	3	4	4	4	3			Laki-Laki
14	3	4	3	4	3	3	4	4	3			Perempuan
15	3	3	3	3	3	3	4	4	3			Perempuan
16	3	4	3	4	3	3	4	4	4			Laki-Laki
17	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
18	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
19	4	3	3	3	3	3	3	4	3			Perempuan
20	3	4	3	4	3	4	3	4	3			Laki-Laki
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4			Perempuan
23	4	4	4	4	3	3	3	4	4			Laki-Laki
24	4	4	4	3	4	4	4	4	4			Laki-Laki
25	3	3	3	4	3	3	4	4	3			Perempuan
26	3	3	3	4	3	3	3	4	4			Perempuan
27	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
28	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
29	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
30	3	3	3	4	3	3	3	4	2			Perempuan
31	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Perempuan
32	3	3	3	4	4	3	3	4	3			Laki-Laki
33	3	3	3	4	4	3	3	3	2		47	Laki-Laki
34	4	4	3	4	3	4	4	2	3		50	Perempuan
35	3	4	3	4	4	4	4	4	4		23	Perempuan
36	4	4	3	3	4	4	4	4	4		17	Laki-Laki
37	3	4	4	3	3	3	3	3	2		18	Laki-Laki
38	4	3	3	3	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
39	4	3	3	3	3	4	4	4	3		17	Laki-Laki
40	3	3	3	3	3	4	4	4	3		17	Laki-Laki
41	3	4	3	4	4	3	3	4	3		18	Perempuan
42	3	3	3	4	3	3	3	4	3		18	Perempuan
43	3	3	4	4	3	4	4	4	3		23	Perempuan
44	3	3	2	4	3	3	3	3	2		32	Perempuan
45	3	3	3	4	3	3	3	4	3		38	Perempuan
46	3	3	3	4	3	3	3	4	3		34	Perempuan
47	3	3	3	4	3	3	3	4	3		37	Perempuan
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3			Laki-Laki
49	4	3	3	4	3	3	4	4	4		50	Perempuan
50	3	3	3	4	3	3	3	4	3		48	Perempuan
51	4	4	3	4	3	3	3	4	3		17	Perempuan
52	3	3	3	4	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
53	3	3	3	4	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
54	3	3	3	4	3	3	3	1	3		18	Laki-Laki
55	3	3	3	4	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4		18	Laki-Laki
57	4	4	3	4	4	4	4	4	4		17	Laki-Laki
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4		17	Laki-Laki
59	3	4	4	4	4	4	4	4	4		17	Laki-Laki
60	3	3	4	4	3	4	3	4	3		17	Laki-Laki
61	4	4	4	3	3	3	4	4	3		17	Laki-Laki
62	2	4	3	4	4	3	3	4	3		17	Laki-Laki
63	3	3	3	4	4	4	3	4	3		18	Perempuan
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4		22	Laki-Laki
65	3	3	4	3	3	3	4	4	3		18	Perempuan
66	3	3	4	3	3	3	3	4	4		19	Perempuan

67	4	4	4	4	3	4	3	4	3	17	Laki-Laki
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17	Laki-Laki
69	4	4	3	4	3	3	4	4	3	18	Perempuan
70	4	3	4	4	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
71	3	3	3	4	3	3	3	3	3	17	Laki-Laki
72	4	3	2	4	3	3	4	4	4	17	Perempuan
73	3	3	3	3	3	3	3	4	3	40	Perempuan
74	4	3	3	4	3	3	3	4	3	40	Laki-Laki
75	4	3	4	4	4	3	4	4	3	30	Laki-Laki
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17	Perempuan
77	3	4	3	4	3	3	3	1	2	17	Laki-Laki
78	4	4	3	4	4	3	3	4	3	31	Laki-Laki
79	3	3	3	3	3	3	4	4	4	18	Laki-Laki
80	3	3	3	4	3	3	3	4	3	17	Laki-Laki
81	3	3	3	4	3	3	4	4	3	39	Laki-Laki
82	4	4	4	4	3	3	3	4	3	17	Perempuan
83	3	4	3	4	4	4	4	4	3	17	Laki-Laki
84	3	3	3	4	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
85	3	4	3	4	3	3	3	4	3	17	Laki-Laki
86	3	3	3	4	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
87	3	4	4	3	3	3	3	4	4	17	Laki-Laki
88	4	4	2	1	4	3	2	3	3	18	Perempuan
89	3	3	3	4	3	3	3	4	3	58	Laki-Laki
90	3	3	3	4	3	3	3	3	3	43	Laki-Laki
91	3	3	4	4	4	4	4	4	3	42	Perempuan
92	4	4	3	4	3	3	4	4	4	27	Perempuan
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3	56	Laki-Laki
94	3	3	3	4	3	3	3	4	3	32	Laki-Laki
95	3	3	3	4	3	3	3	4	3	34	Laki-Laki
96	3	3	3	4	3	3	3	4	3	36	Laki-Laki
97	3	3	3	4	3	3	3	4	3	24	Perempuan
98	3	3	3	4	3	3	3	4	3	42	Laki-Laki
99	3	3	3	4	3	3	3	4	3	41	Perempuan
100	3	3	3	4	3	3	3	4	3	28	Laki-Laki
101	3	4	3	4	4	3	4	4	4	17	Laki-Laki
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25	Laki-Laki
103	3	3	3	4	4	3	4	4	3	18	Laki-Laki
104	3	4	3	4	3	3	4	4	3	20	Perempuan
105	3	3	3	4	3	3	4	4	3	19	Laki-Laki
106	3	4	4	4	4	3	4	4	3	20	Perempuan
107	3	3	3	4	3	4	4	4	3	30	Laki-Laki
108	3	3	3	4	3	3	3	4	3	27	Laki-Laki
109	3	3	3	4	3	3	4	4	3	18	Perempuan
110	3	3	3	4	3	3	4	4	3	23	Laki-Laki
111	3	3	3	4	3	3	4	4	4	19	Laki-Laki
112	3	3	3	4	3	3	4	4	4	35	Perempuan
113	3	3	3	4	3	3	3	4	3	30	Laki-Laki
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37	Perempuan
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	Perempuan
116	4	3	3	4	3	3	3	4	3	19	Perempuan
117	4	4	4	4	4	4	4	4	3	17	Perempuan
118	3	3	3	4	3	3	4	4	4	17	Perempuan
119	3	3	3	3	3	3	3	4	3	17	Perempuan
120	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28	Laki-Laki
121	3	3	3	3	3	3	3	4	3	18	Perempuan
122	3	3	3	3	3	3	3	4	3	17	Perempuan
123	3	3	3	4	3	3	3	4	3	18	Perempuan
124	3	3	3	4	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
125	3	3	3	4	3	3	3	3	3	19	Laki-Laki
126	1	2	2	2	1	1	1	3	2	17	Laki-Laki
127	3	3	3	3	3	3	4	4	2	18	Laki-Laki
128	4	4	3	4	3	4	4	4	3	17	Perempuan
129	3	3	3	4	3	3	3	3	3	45	Perempuan
130	4	3	3	4	3	3	3	4	3	17	Perempuan
131	4	2	3	4	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
132	3	3	3	3	3	3	3	4	3	64	Laki-Laki
133	3	3	3	3	3	3	4	4	3	54	Perempuan
134	3	3	3	3	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
135	1	3	3	1	3	3	2	2	2	18	Perempuan
136	3	4	4	2	3	4	3	4	4	18	Perempuan
137	3	3	3	2	3	3	3	4	3	18	Laki-Laki
138	4	4	3	3	3	3	4	3	3	18	Laki-Laki
139	3	3	3	4	3	4	3	4	3	18	Laki-Laki

140	3	3	2	2	3	2	3	3	2		18	Perempuan
141	3	3	3	4	3	3	2	3	2		18	Laki-Laki
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4		35	Perempuan
143	3	3	3	4	3	3	3	4	4		18	Perempuan
144	4	3	3	3	3	3	3	4	2		18	Perempuan
145	3	3	3	4	4	3	3	4	3		17	Perempuan
146	3	3	3	3	3	3	3	4	3		18	Perempuan
147	3	3	3	3	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
148	3	3	3	3	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
149	3	3	3	3	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
150	3	4	4	4	3	3	3	4	3		17	Perempuan
151	4	3	3	4	3	3	3	4	3		17	Laki-Laki
152	3	3	2	4	3	3	4	4	3		18	Laki-Laki
153	3	3	2	4	3	3	3	4	3		18	Laki-Laki
154	3	3	3	4	3	3	3	4	3		17	Perempuan
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3		17	Laki-Laki
156	3	3	3	4	3	3	3	4	3		18	Laki-Laki
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4		18	Perempuan
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4		33	Laki-Laki
159	3	3	3	4	3	4	3	4	3		18	Laki-Laki
160	3	3	3	4	3	4	3	4	3		18	Laki-Laki
161	4	3	4	4	4	4	4	4	4		18	Perempuan
162	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Laura sussanti	18	Perempuan
163	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Faizul kirom	17	Laki-Laki
164	3	3	3	4	3	4	4	4	4	Wahyu Enggal saputra	17	Laki-Laki
165	3	3	3	4	3	3	3	4	3	IHWAN HERMAN HARIANT	18	Laki-Laki
166	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Lyndan	17	Laki-Laki
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Alfan rakkhaz shiehab	17	Laki-Laki
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ADJI ARINGGA	18	Laki-Laki
169	3	3	3	4	3	3	3	4	2	Akhmad Syafi'i Putra	17	Laki-Laki
170	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Ahmad Abdul mufid	18	Laki-Laki
171	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Putra Airlangga febrianto	19	Laki-Laki
172	3	3	3	4	3	4	3	4	3	Seila Shinta Dewi	18	Perempuan
173	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Dimas Restu harbeni	18	Laki-Laki
174	4	4	4	4	4	3	4	4	3	Adip	36	Laki-Laki
175	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Sumiati	42	Perempuan
176	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Bimaadikusuma	20	Laki-Laki
177	3	4	4	4	3	4	4	4	4	ADI QIANTO	18	Laki-Laki
178	3	4	4	4	3	3	3	4	4	Nazaruddin Alfarinzqy	18	Laki-Laki
179	3	4	4	4	3	4	4	4	4	Himatus syari'ah alfanani	17	Perempuan
180	4	3	3	4	3	4	4	4	3	Liana rinata dewi	19	Perempuan
181	4	3	3	4	3	3	3	4	3	Prilujeng Anggarasi	35	Perempuan
182	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Cindy Noviana Pitaloka	17	Perempuan
183	3	3	3	4	3	4	4	4	4	Niken wulandari	17	Perempuan
184	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Eka Zalva Maulidina	17	Perempuan
185	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Novitia	17	Perempuan
186	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Risma puji astutik	17	Perempuan
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enggi septiyan Ardiansyah	19	Laki-Laki
188	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Diah Ayu Putri Kumalasari	17	Perempuan
189	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Florean Ayunda Avrilyanant	17	Perempuan
190	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Citra Aprillia Wulan dari	17	Perempuan
191	3	3	3	4	3	4	3	4	2	Gayuh angger utomo	7	Laki-Laki
192	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Muhammad Daniel ricky	17	Laki-Laki
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4	MUHAMMAD ANDI SAPUTF	18	Laki-Laki
194	3	3	3	4	3	4	4	4	3	NUR CHOLIS	17	Laki-Laki
195	3	3	3	4	3	3	3	4	3	BA'YS TRIJAYANTO	17	Laki-Laki
196	3	3	2	4	3	3	3	4	3	MOCHAMMAD YASRIL HIDA	18	Laki-Laki
197	4	4	3	4	3	4	3	4	3	FANI BIMA PRINATA	18	Laki-Laki
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ADI YUDI SUMANTRI	19	Laki-Laki
199	4	4	4	3	3	4	3	4	3	GUNTUR YUNDA BUDI CAH	19	Laki-Laki
200	3	4	3	4	3	3	3	4	4	Vera veronika amalia	17	Perempuan
201	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Nadiya Dwi Ernasari	18	Perempuan
202	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Siska Puspita sari	20	Perempuan
203	3	3	4	4	3	4	4	4	4	Faren Asti Filanti	17	Perempuan
204	3	3	3	4	3	3	3	4	2	Elsavia	22	Perempuan
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dedek Dwi Apriliato	17	Laki-Laki
206	3	1	4	3	3	4	4	4	3	HAPPY DINHO KAHA	17	Laki-Laki
207	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Saskia dwi priyanti	17	Perempuan
208	4	4	4	3	4	3	3	4	3	Sinta Ramadhani	18	Perempuan
209	3	3	3	4	3	3	3	2	3	yanto	67	Laki-Laki
210	4	3	3	3	3	4	4	4	4	Anida Fatchiyah Ramadhan	1	Perempuan
211	4	3	4	4	4	4	3	4	4	MOH.KHOLILURROHMAN	17	Laki-Laki
212	3	3	3	3	3	3	3	4	3	SILVIA PARA ANDINI	17	Laki-Laki

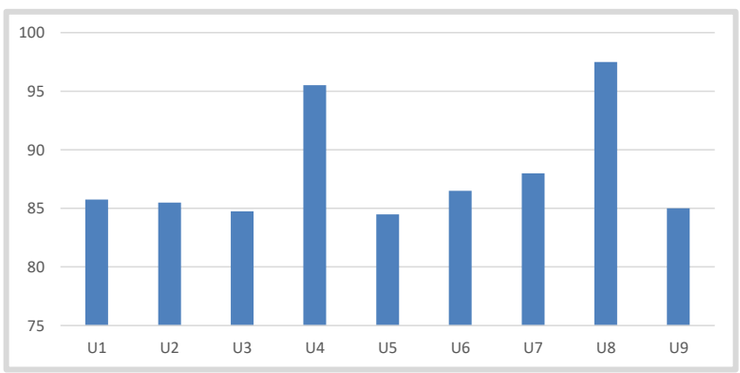
213	3	3	3	3	3	3	3	4	3	nava aura natasya	17	Perempuan
214	4	4	4	3	4	4	4	4	4	Achmad Febrian Alviansyah	17	Laki-Laki
215	3	3	4	4	3	3	3	4	4	Ahmad Fauzan Nashrulloh	17	Laki-Laki
216	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Dian Karina Putri	17	Perempuan
217	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Ganis Tri Prastya	17	Laki-Laki
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DIMAS ADI NURCAHYO	18	Laki-Laki
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	MUHAMMAD ARDIANSYAH	17	Laki-Laki
220	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Rizki shofa safrina	18	Perempuan
221	4	3	3	4	4	3	4	4	3	WENDIE ARYA DEFRIANSYA	20	Laki-Laki
222	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Muhammad abidin	17	Laki-Laki
223	4	4	4	4	4	4	4	4	3	M.LUKMAN PRASETYA	18	Laki-Laki
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4	NOVANDA YOGA PRASETYA	17	Laki-Laki
225	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Fani intan septiana subandi	17	Perempuan
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kartika dewi sekar arum	17	Perempuan
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Anton diki Leo Yudi suband	21	Laki-Laki
228	4	4	4	4	3	3	3	4	3	Dimas	17	Laki-Laki
229	3	3	3	3	3	4	3	4	3	SUTRA AGHNIAK	17	Perempuan
230	3	3	3	3	3	4	3	4	3	SUTRA AGHNIAK	17	Perempuan
231	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Fika amiliya	17	Perempuan
232	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Ayu Ni'matul Fa'uziyah	17	Perempuan
233	3	3	3	4	3	3	4	4	3	KRISTALIA YUWANA PRISTI	18	Perempuan
234	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Ria ambarwati	17	Perempuan
235	3	3	4	4	3	4	4	4	3	MEY LINDA TRI AVANTI	17	Perempuan
236	3	3	3	3	3	3	3	4	4	M. Zulvan Arinalhaq	17	Laki-Laki
237	4	3	3	3	3	3	4	4	4	Bagus firman nur rojjabi	18	Laki-Laki
238	3	4	4	4	4	4	4	3	3	Ida	35	Laki-Laki
239	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Agung	36	Laki-Laki
240	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Pandu Setiawan	18	Laki-Laki
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4	andika	18	Laki-Laki
242	3	3	3	3	4	4	4	4	4	ARINDA RIFATULLOH	17	Perempuan
243	3	3	3	3	3	3	3	4	3	SANTI	18	Perempuan
244	3	4	4	4	4	4	4	4	4	lintang anggun pramitha	18	Perempuan
245	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Niswatun khoyimah	18	Perempuan
246	3	3	3	3	3	4	4	4	4	Kuri lailatis saadah	17	Perempuan
247	3	3	4	4	3	3	3	4	3	Nanang	20	Laki-Laki
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Fajar Ayu Wulandari	18	Perempuan
249	3	3	3	4	3	3	3	4	3	M ANDY SETIAWAN	17	Laki-Laki
250	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Anggraeni	17	Perempuan
251	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Hepi prabowo	18	Laki-Laki
252	3	3	3	4	3	3	4	4	4	ANDREAN DWI PRATAMA	17	Laki-Laki
253	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Septika carvanela	17	Perempuan
254	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Dimas Prasetyo	17	Laki-Laki
255	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Eka Aditiya ardana	18	Laki-Laki
256	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Diana	18	Laki-Laki
257	3	3	3	3	3	3	3	3	2	Karina Prasanti	17	Perempuan
258	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Elisa Andriani	18	Perempuan
259	4	3	4	4	4	4	4	4	4	ANDREAN DWI PRATAMA	17	Laki-Laki
260	3	3	3	4	3	3	3	4	3	MUHAMMAD ATHOILLAH A	17	Laki-Laki
261	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Salfa Wafa Zaidah	17	Perempuan
262	4	4	3	3	3	3	3	4	3	AMEYLIA DEVITA PUTRI	17	Perempuan
263	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Putri Ayu Badriyani Romadl	17	Perempuan
264	3	3	4	4	4	3	4	4	4	ERWAN SUMANTRI	33	Laki-Laki
265	4	4	4	4	4	4	4	4	4	siti kholifah	38	Perempuan
266	4	3	3	3	3	3	3	4	3	VALEA ESILANANTA	17	Perempuan
267	4	3	3	4	3	3	3	4	3	AHMAD FARIT DWI PRATAM	17	Laki-Laki
268	4	3	3	3	3	3	3	4	2	Okvita Dwi Ulan Ramadhan	18	Perempuan
269	3	3	3	4	3	3	4	4	4	SALSA BELLA RAMADHANI	17	Perempuan
270	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Neilla Fitri Anggraini	17	Perempuan
271	3	3	3	4	3	4	3	4	4	Najwa Annisa ramadhani	18	Perempuan
272	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Nabillah Rahmadina	17	Perempuan
273	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Adit setiya	18	Laki-Laki
274	2	2	2	4	2	2	3	4	3	Andre Saputra	17	Laki-Laki
275	2	2	2	4	2	2	3	4	3	Bungah Khalid Ananta	18	Laki-Laki
276	3	2	2	4	2	2	3	4	3	Kiki pradianta	17	Laki-Laki
277	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Moh yoga handika	17	Laki-Laki
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M.lukmanul khakim	17	Laki-Laki
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M Ilham Ramdhani	17	Laki-Laki
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Abdul ghofur	17	Laki-Laki
281	4	4	4	4	4	4	3	4	4	NAJWA AMALYA PUTRI	17	Perempuan
282	3	4	3	4	3	4	4	4	4	Haszar dwi Handayani Sutik	17	Perempuan
283	4	4	4	4	3	4	4	1	3	Isti Garnis Arianti	17	Perempuan
284	3	3	3	4	4	3	4	1	2	Aginda Julya Rahmawati	17	Perempuan
285	3	4	3	4	4	4	3	4	3	Seftiyan dini Kartika Ramad	17	Perempuan

286	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Asep ramadhan	17	Laki-Laki
287	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Argo setya sasongko	17	Laki-Laki
288	3	4	4	4	4	4	4	4	4	dwi vica Fatmawati	17	Perempuan
289	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Gigih Rivan Ardian	17	Laki-Laki
290	3	4	3	4	3	4	3	4	3	Galang satria fambudi	17	Laki-Laki
291	3	3	3	4	3	3	3	4	3	NANDA WAHYU HIDAYAH	17	Laki-Laki
292	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Ilham lambang sucahyo	18	Laki-Laki
293	3	3	3	4	3	3	3	4	3	MUCHAMAD YONGKI RIO F	18	Laki-Laki
294	4	4	4	4	4	4	4	4	4	NUR ROKHMAN ABIDIN	17	Laki-Laki
295	3	3	3	4	3	3	3	4	3	RISKA RULLY ANGGRAINI	17	Perempuan
296	4	4	4	4	4	4	4	4	4	MUHAMAD EFENDIANTI	18	Laki-Laki
297	3	3	3	4	3	3	3	4	3	SHOVY DIA AYUNDASARI	17	Perempuan
298	3	3	3	4	3	3	3	4	3	ANTIKA DIAH MATIRTA	18	Perempuan
299	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ZAHRA ALYA RAHMASARI	17	Perempuan
300	3	4	3	4	3	3	4	4	3	VANI SEPTI ANDREANI	17	Perempuan
301	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rohmatul Fitri Ardianti	17	Perempuan
302	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ekha Feliandi Asta Saputro	18	Laki-Laki
303	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Puji santisa	39	Laki-Laki
304	3	4	3	4	3	3	3	4	2	AgengDhiofikriansyah	17	Laki-Laki
305	4	4	3	4	3	3	4	4	4	Sonah	23	Perempuan
306	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Juli kuswoyo	33	Laki-Laki
307	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lita dwi cahyati	24	Perempuan
308	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lita dwi cahyati	24	Perempuan
309	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Muhammad Riswandi iman	21	Laki-Laki
310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	WIDYA PUTRI AYUNINGTYA	17	Perempuan
311	3	4	4	4	3	4	4	4	4	Refinda aulia usfatun khasa	17	Perempuan
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Isnaniah Etika Rizqi	17	Perempuan
313	3	4	3	4	3	3	3	4	3	Mohammad Taufiq Hidayat	17	Laki-Laki
314	3	3	3	4	3	3	3	4	3	M.Gigit Qodir jailani	18	Laki-Laki
315	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Eka Dwi Saputra	19	Laki-Laki
316	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Indi Tri Larasati	18	Perempuan
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rendra Agus Santosa	18	Laki-Laki
318	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tri Wahyuningtias	17	Perempuan
319	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Imelda yualita	17	Perempuan
320	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jerry Ixbal Ervyan	18	Laki-Laki
321	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Moch.radit suginto	17	Laki-Laki
322	4	4	4	4	4	4	4	4	4	SUDARMI	48	Perempuan
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hengki septiandi	17	Laki-Laki
324	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ahmad setyawan	16	Laki-Laki
325	4	4	4	4	4	4	4	4	4	m.Dendi satrio	17	Laki-Laki
326	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Yuliana	17	Perempuan
327	3	3	3	4	4	4	4	4	4	RATNA SARI	23	Perempuan
328	4	3	3	4	4	4	4	4	4	ERFI NURFAUZI	29	Laki-Laki
329	4	4	4	4	4	4	4	4	4	TRIO AGUS SETIAWAN	19	Laki-Laki
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4	M afif isnan	18	Laki-Laki
331	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Yenni Febriyanti	17	Perempuan
332	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Novi peni yuliani	45	Perempuan
333	3	4	3	4	3	3	3	4	3	SEPTYAN ARYA WARDANI	17	Laki-Laki
334	4	3	3	4	3	4	3	4	3	Muhamad arofi'i	17	Laki-Laki
335	4	3	2	4	3	4	4	4	4	DEWI RETNO SUWARI	17	Perempuan
336	3	3	3	4	3	3	4	4	4	Arya Aditya Majid	17	Laki-Laki
337	3	4	4	4	3	4	4	4	3	Rahmat rehan fauzidan	17	Laki-Laki
338	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ellya Novianti	17	Perempuan
339	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Imam rifai	19	Laki-Laki
340	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Widya Rahma wati	17	Perempuan
341	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Galuh adisni	18	Perempuan
342	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Alfina citra nova susena	17	Perempuan
343	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Enggal Galih Pramugani	18	Laki-Laki
344	3	3	3	4	3	4	4	4	3	BALGIS MELDA AURELIA	18	Perempuan
345	4	4	4	4	3	4	4	4	4	ANISA FITRIA RAHMAWATI	18	Perempuan
346	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Taranila dwi aftari	17	Perempuan
347	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Mutiara yuda ningtiyas	17	Perempuan
348	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Oktaviya Icha Bella	17	Perempuan
349	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Mutiara yuda ningtiyas	17	Perempuan
350	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Roy satrio	18	Laki-Laki
351	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Fikri Maulana	17	Laki-Laki
352	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jauharoh zulfa salma	17	Perempuan
353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Zena Novi Anggraini	17	Perempuan
354	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RADITYA PUTRA MAULANA	17	Laki-Laki
355	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ninik Suryani	17	Perempuan
356	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RIVALDO SEPTIANO PUTRA	18	Laki-Laki
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Haikal Ramdani Aryanto	17	Laki-Laki
358	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mochammad ridwan	17	Laki-Laki

359	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Septy isna rhamadhani	17	Perempuan
360	4	4	4	4	4	4	4	4	4	NEGITA TIA RAMADANI	17	Perempuan
361	4	4	4	4	4	4	4	4	4	NARENDRA REGZI DAVA PA	17	Laki-Laki
362	4	4	4	4	4	4	4	4	4	JOHAN TRI WAHYUDI	17	Laki-Laki
363	4	4	4	4	4	4	4	4	4	IFRINSIA CATUR NOVIANA S	17	Perempuan
364	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mohammad Faril Fadhly	17	Laki-Laki
365	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Olga Dyta Adiya Pamekar	17	Perempuan
366	4	4	4	4	4	4	4	4	4	IFRINSIA CATUR NOVIANA S	17	Perempuan
367	3	3	3	4	3	4	4	4	4	Arya Dwi Septian	17	Laki-Laki
368	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ratih Wulandari	17	Perempuan
369	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Reygar putra khrisye pradis	17	Laki-Laki
370	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ageng Dhio Fikriansyah	17	Laki-Laki
371	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ageng Dhio Fikriansyah	17	Laki-Laki
372	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Shabrina trinova Miranti	17	Perempuan
373	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RHEHAN ZIYA RAHMADHAI	17	Laki-Laki
374	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Purnawati	34	Laki-Laki
375	3	4	3	3	3	3	3	4	4	Nurul Aulia	17	Perempuan
376	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Hafidz Al Fathoni	17	Laki-Laki
377	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Daud Aji Dewantoro	17	Laki-Laki
378	3	4	3	4	3	3	3	4	3	Susanti	18	Perempuan
379	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Aji Pangestu	17	Laki-Laki
380	3	4	4	4	3	4	4	4	3	ANANGGADEVA DEDI PRIAI	17	Laki-Laki
381	3	4	4	2	4	4	4	4	4	RENDI IKSANTI AJI	19	Laki-Laki
382	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Yuliana	17	Perempuan
383	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Damaardiansyah	18	Laki-Laki
384	4	3	4	4	4	3	3	4	4	ACHMAD IQBAL KARIM AM	17	Laki-Laki
385	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ACHMAD FAIZAL FATHIR M	17	Laki-Laki
386	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Habibi dwi saputra	17	Laki-Laki
387	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nikmatus	19	Laki-Laki
388	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bregi	47	Laki-Laki
389	4	3	3	4	3	3	4	4	4	Mochad Taufik syahroni	18	Laki-Laki
390	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bryan Ferdiansah	18	Laki-Laki
391	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ahmad Harjono	17	Laki-Laki
392	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Imam maulana ishaq	17	Laki-Laki
393	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rendy rangga permana	18	Laki-Laki
394	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bagus Adi Saputra	18	Laki-Laki
395	4	4	3	4	3	4	4	4	3	Arya saputra	17	Laki-Laki
396	4	3	3	4	3	4	4	4	4	Ahmat Erik Eka Saputra	18	Laki-Laki
397	3	3	4	4	4	4	3	4	4	DEBRINA PUTRI ARFIANTI	19	Perempuan
398	3	3	3	3	3	3	3	4	3	afdal Noval fais	17	Laki-Laki
399	3	4	4	4	4	4	4	4	4	DIKA PRASTYO	17	Laki-Laki
400	3	4	4	4	4	4	4	4	4	RAHMAT ADIT BAGUS PAM	17	Laki-Laki
401	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ZUHRIFAL RIDWAN MUTTA	17	Laki-Laki
402	3	3	4	4	4	4	4	4	4	KEVIN MAULANA SATRIA M	10	Laki-Laki
403	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Zakka Luthfi Muhammad	17	Laki-Laki
404	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Anang oktarustian	18	Laki-Laki
405	4	3	3	4	4	3	4	4	4	M. ZEKIYA ADI SAPUTRA	16	Laki-Laki
406	3	3	4	4	4	4	4	4	4	Arif Al Ikhlas	18	Laki-Laki
407	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Ali Al hakim	17	Laki-Laki
408	3	4	4	4	4	4	4	4	4	085859943602	23	Laki-Laki
409	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RUDY HERMANTO	25	Laki-Laki
410	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dwi Andika Suyanto	17	Laki-Laki
411	4	4	4	4	4	4	4	4	4	085859943602	23	Laki-Laki
412	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ubaidah ibenul jaroh	17	Perempuan
413	4	4	4	4	4	4	4	4	4	MUKHAMAT	7	Laki-Laki
414	4	3	4	4	3	4	4	4	3	Lina Yuli arista	31	Perempuan
415	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Taufiq	36	Laki-Laki
416	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sriningsih	48	Perempuan
417	3	3	4	4	3	4	4	4	4	Candra dwi prastio	18	Laki-Laki
418	4	3	4	3	3	3	3	4	4	GITA DWI ARUM SARI	17	Perempuan
419	3	3	3	4	3	4	3	4	3	Mochammad Zainal Arifin	18	Laki-Laki
420	3	3	3	4	3	3	4	4	4	A'AN ARIS SURYANTO	17	Laki-Laki
421	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Muhammad Sigit Khairiel R	17	Laki-Laki
422	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Davi Fathir Baihaqi	16	Laki-Laki
423	4	4	3	4	3	3	3	4	3	Eki Rahmadani	17	Perempuan
424	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Eki Rahmadani	17	Perempuan
425	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Beni	23	Laki-Laki
426	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Beni	23	Laki-Laki
427	4	4	4	4	4	4	4	4	4	YASRILANANTABAHARUDIN	17	Laki-Laki
428	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Lingga pratiwi	17	Perempuan
429	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Endang nikmatus sholikah	17	Perempuan
430	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Anik Anggraini	17	Perempuan
431	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mahendra Yoga Ardiansyah	17	Laki-Laki

432	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dickye Jhon Ferry Roy	17	Laki-Laki
433	3	3	3	4	3	3	3	4	3	saskia nuraisyah	17	Perempuan
434	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mahardika	17	Laki-Laki
435	4	4	4	4	4	4	4	4	4	adi	17	Laki-Laki
436	3	2	3	4	3	3	3	4	3	Alisia dian luciana	17	Perempuan
437	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Desi wulansari	17	Perempuan
438	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Reffi Dea Natasya	17	Perempuan
439	4	3	3	4	3	3	3	4	3	DEKA DWIANA ARISTA	17	Perempuan
440	4	4	4	4	3	4	3	4	3	DIKI IRMANSYAH	21	Laki-Laki
441	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Aldevana irfan Hidayat	17	Laki-Laki
442	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mokhamad aditya	17	Laki-Laki
443	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Aidil	17	Laki-Laki
444	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Iva	30	Perempuan
445	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pipit	32	Perempuan
446	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Krisdian Yuli sunarto	17	Laki-Laki
447	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Dita oktaviana	17	Perempuan
448	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Mar'atul Magfiroh	17	Perempuan
449	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Rizal Yulian putra	17	Laki-Laki
450	3	3	4	4	3	4	4	4	3	Muhammad Nur Alim	17	Laki-Laki
451	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Lyindi Fitriani	17	Perempuan
452	3	3	3	4	3	3	3	4	3	M.nova ferdiansyah	17	Laki-Laki
453	3	3	3	4	3	4	3	4	3	Restu Riang Zulfiansyah	18	Laki-Laki
454	4	4	3	4	3	3	3	4	3	imam 'alim musyurofa	16	Laki-Laki
455	3	2	2	3	3	3	3	4	3	Icha sefia wiansukma	17	Perempuan
456	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Naufal jamil	16	Laki-Laki
457	3	3	3	4	3	3	3	4	3	AHMAD JAWAHIRUL IKHSA	16	Laki-Laki
458	3	3	3	4	3	4	3	4	3	Jon krisma	17	Laki-Laki
459	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Nadya Desvita Ningrum	17	Perempuan
460	4	4	3	4	3	4	3	4	3	DION RANGGA SETIAWAN	16	Laki-Laki
461	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Deto kasatria Pradana putra	17	Laki-Laki
462	4	4	4	4	4	4	4	4	4	HERLIN ISNA RAHMADANI	17	Perempuan
463	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Ayu suaibah	18	Perempuan
464	3	3	4	4	3	2	3	4	3	Dinno Prasetyo R.	17	Laki-Laki
465	3	3	3	4	3	4	4	4	3	Daniel abidwi bastyan	17	Laki-Laki
466	3	3	3	3	3	3	3	4	2	Fadil putra m	17	Laki-Laki
467	3	3	4	4	3	4	4	4	4	SITI NUR KARINA	17	Perempuan
468	3	3	4	4	3	4	4	4	4	Susilawati dwi rahmad	17	Perempuan
469	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rita Tri Septianning Tiyas	17	Perempuan
470	3	3	3	4	3	3	3	4	2	Fais Nur aziziyah	16	Perempuan
471	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Khoirunnisa' Rofifah	17	Perempuan
472	4	4	4	4	4	4	4	4	4	085859943602	23	Laki-Laki
Nilai/Unsur	1617	1614	1599	1802	1595	1635	1660	1839	1607			
NRR/Unsur	3,43	3,42	3,39	3,82	3,38	3,46	3,52	3,9	3,4			
NRR Tertimbang/Unsur	0,38	0,38	0,37	0,42	0,37	0,38	0,39	0,43	0,37			
JML NRR IKM TERTIMBANG	3,49											
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	87,21											

85,75	85,5	84,8	95,5	84,5	86,5	88	97,5	85



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman 284 Nganjuk 64412
Telepon (0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

Nomor	:	X.700/230/411.200/2023
Tanggal	:	11 Juli 2023
Lampiran	:	Satu berkas
Satuan Kerja	:	Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
Tahun	:	2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1) Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2) Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).

CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampaivke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/538/411.200/2023 tanggal 05 Juni 2023 mulai tanggal 05 sampai dengan 30 Juni 2023.

F. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.
b. Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik.
c. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jatikalen sebagaimana IKU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.505/2022 tidak selaras dengan sasaran pada Renstra.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien namun belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- Dalam rangka melakukan pengukuran kinerja diperlukan pengumpulan data kinerja yang salah satunya berupa capaian kinerja individu secara berkala/tribulan, namun data tersebut belum tersaji secara memadai.
- Pengukuran rencana aksi telah dilakukan secara berkala/tribulan dan disajikan pada Laporan Evaluasi Tribulan. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan pada tribulan yang belum tercapai targetnya sudah dilakukan penyesuaian dengan melaksanakannya di tribulan berikutnya melalui penyesuaian atau tambahan strategi namun belum dapat dibuktikan apakah ada perubahan kebijakan (kebijakan baru)

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
b. Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
c. Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan Standar, diantaranya:
   - Pada Bab IV Penutup tidak dijelaskan secara mendetail atau spesifik mengenai langkah perbaikan di masa mendatang
   - LKJiP sudah menjelaskan capaian IKU, namun IKU yang disajikan tidak selaras dengan Renstra
   - LKJiP belum menjelaskan capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
c. Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum optimal sehingga belum dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dituangkan dalam Laporan berbentuk narasi namun belum disertai bukti tindaklanjut yang memadai sesuai dengan rekomendasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada **Camat Jatikalen** Kabupaten Nganjuk untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

a. Renstra agar menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai IKU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/023.b/K/411.510/202. (sesuai dengan sasaran pada Renstra)

2) Pengukuran Kinerja

a. Memerintahkan kepada seluruh ASN agar melaporkan capaian kinerja individu setiap tribulan yang ditandatangani atasan langsung, sebagai bahan untuk mengukur capaian kinerja OPD.
b. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja internal secara berkala/tribulan dengan langkah-langkah:
   - Mengumpulkan data capaian kinerja individu secara berkala/Tribulan tribulan dan data kinerja yang diperlukan sebagai bahan pengukuran kinerja.
   - Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang.
   - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh Tim Evaluasi Internal yang ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan organisasi melalui Surat Keputusan.
   - Melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi kinerja secara berkala/tribulan yang didukung dengan nota dinas, daftar hadir, nutula dan dokumentasi rapat.
   - Hasil Evaluasi Kinerja Internal dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berbentuk narasi.
   - Menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal.

- Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut menjadi dasar dalam perubahan Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja antara lain melalui Perubahan Renja, Perubahan Rencana Aksi dan Perubahan Anggaran.

3) Pelaporan Kinerja

a. Dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja agar berpedoman pada standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Camat Jatikalen Kabupaten Nganjuk agar melakukan reviu Dokumen Laporan Kinerja untuk memastikan draft yang telah disusun telah sesuai dengan standar penyusunan laporan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum Dokumen Laporan Kinerja dilegalformalkan.
Catatan yang perlu mendapatkan perhatian atas Dokumen Laporan Kinerja, diantaranya:
   - Pada Bab IV Penutup agar dijelaskan secara mendetail atau spesifik mengenai langkah perbaikan di masa mendatang
   - LKJiP sudah menjelaskan capaian IKU, agar IKU yang disajikan selaras dengan Renstra
   - LKJiP agar menjelaskan capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Internal secara berkala yang relevan dengan Rekomendasi yang diberikan pimpinan yang dituangkan dalam bentuk narasi .

III. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, memperoleh nilai sebesar 74,5 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	16,75
Jumlah		100 %	74,65

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

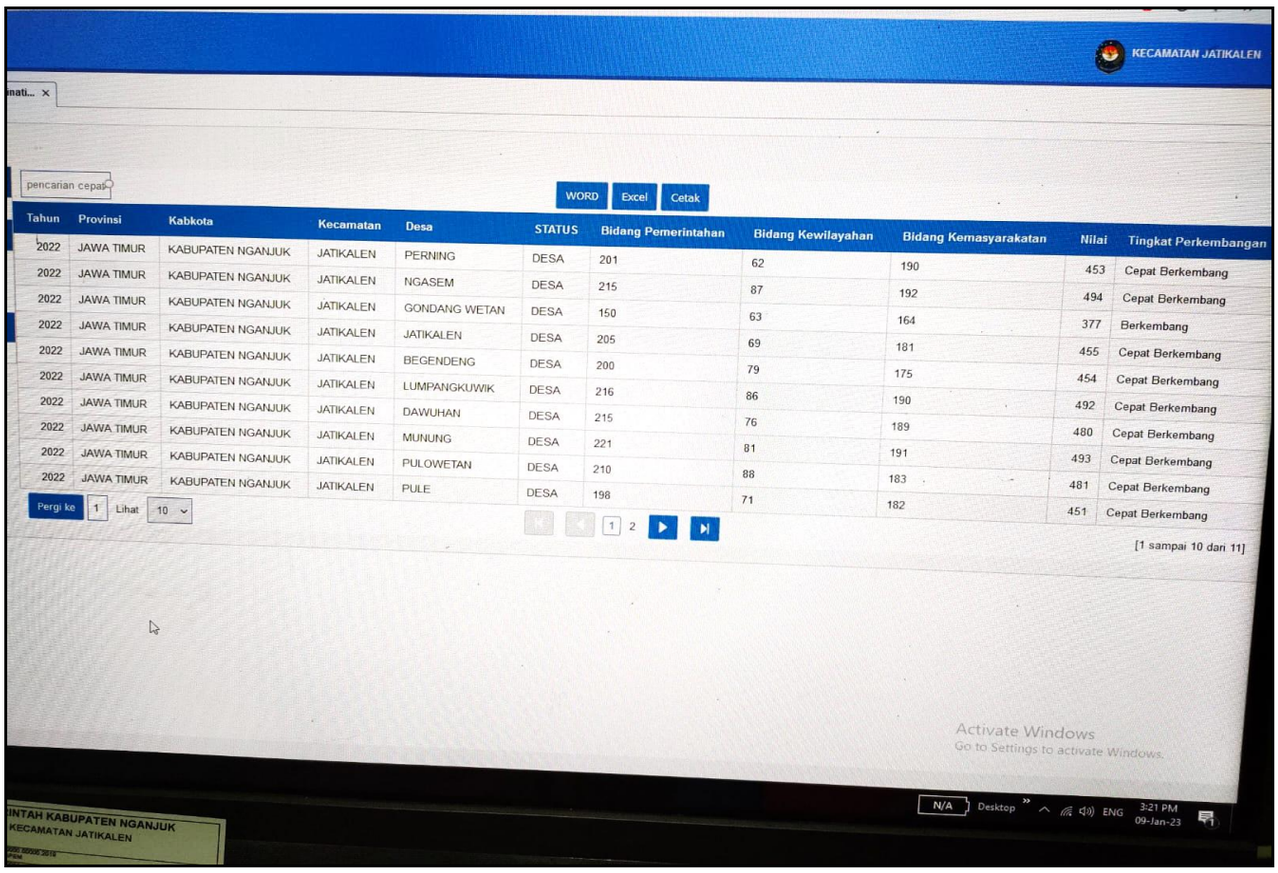
Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk disampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

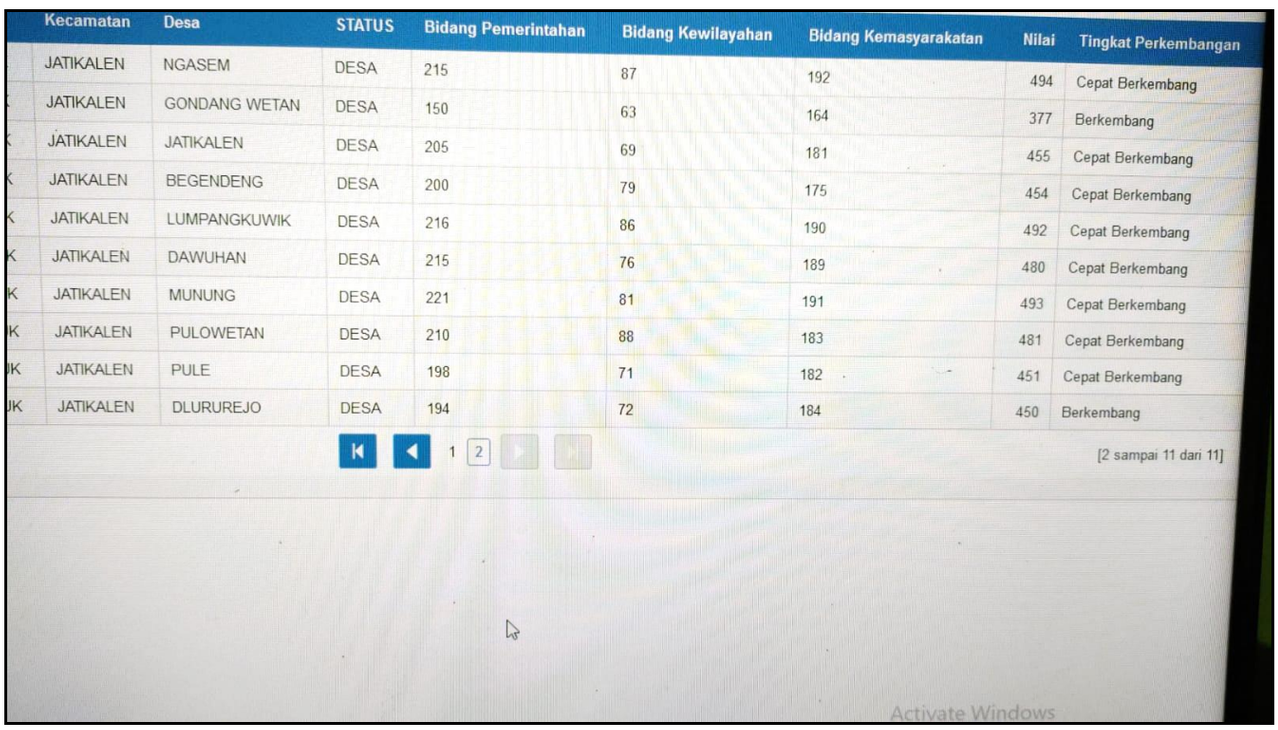
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005198703 1 010

LAPORAN HASIL EPDESKEL

KECAMATAN JATIKALEN TAHUN 2022





DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jatikalen

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**				**2.489.535.700**	**73.461.200**	**0**	**0**	**2.562.996.900**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.228.476.250**	**73.461.200**	**0**	**0**	**2.301.937.450**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1.588.500**	**0**	**0**	**0**	**1.588.500**	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		1.588.500	0	0	0	1.588.500	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.916.373.500**	**0**	**0**	**0**	**1.918.373.500**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		1.915.108.000	0	0	0	1.915.108.000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		2.457.500	0	0	0	2.457.500	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		808.000	0	0	0	808.000	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**23.050.000**	**0**	**0**	**0**	**23.050.000**	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		9.050.000	0	0	0	9.050.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		9.000.000	0	0	0	9.000.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**85.751.550**	**5.175.000**	**0**	**0**	**90.926.550**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		15.441.500	0	0	0	15.441.500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		26.432.050	0	0	0	26.432.050	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		17.778.000	0	0	0	17.778.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		11.360.000	0	0	0	11.360.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		14.740.000	0	0	0	14.740.000	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		0	5.175.000	0	0	5.175.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**68.286.200**	**0**	**0**	**68.286.200**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		0	20.936.200	0	0	20.936.200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		0	47.350.000	0	0	47.350.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**73.142.000**	**0**	**0**	**0**	**73.142.000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		30.892.000	0	0	0	30.892.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		42.250.000	0	0	0	42.250.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**126.570.700**	**0**	**0**	**0**	**126.570.700**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		47.508.300	0	0	0	47.508.300	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		16.550.000	0	0	0	16.550.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		62.512.400	0	0	0	62.512.400	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**56.268.850**	**0**	**0**	**0**	**56.268.850**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**48.175.300**	**0**	**0**	**0**	**48.175.300**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		48.175.300	0	0	0	48.175.300	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**4.123.350**	**0**	**0**	**0**	**4.123.350**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		4.123.350	0	0	0	4.123.350	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**3.970.200**	**0**	**0**	**0**	**3.970.200**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		3.970.200	0	0	0	3.970.200	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**37.380.550**	**0**	**0**	**0**	**37.380.550**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**37.380.550**	**0**	**0**	**0**	**37.380.550**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		12.102.800	0	0	0	12.102.800	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		25.277.750	0	0	0	25.277.750	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**17.112.800**	**0**	**0**	**0**	**17.112.800**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**17.112.800**	**0**	**0**	**0**	**17.112.800**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		17.112.800	0	0	0	17.112.800	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**105.965.350**	**0**	**0**	**0**	**105.965.350**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**105.965.350**	**0**	**0**	**0**	**105.965.350**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		105.965.350	0	0	0	105.965.350	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**44.331.900**	**0**	**0**	**0**	**44.331.900**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**44.331.900**	**0**	**0**	**0**	**44.331.900**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		35.321.700	0	0	0	35.321.700	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan		9.010.200	0	0	0	9.010.200	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp140.143.918
Februari	Rp177.645.293
Maret	Rp245.538.352
April	Rp521.343.834
Mei	Rp163.667.493
Juni	Rp166.395.493
Juli	Rp406.528.368
Agustus	Rp160.817.493
September	Rp157.737.493
Oktober	Rp182.480.268
November	Rp161.542.493
Desember	Rp79.156.402
Jumlah	Rp2.562.996.900

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Camat Jatikalen

SUWITO RAHARJO, SH, MM
NIP: 196510251986031020

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

Formulir Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Urusan: UNSUR KEWILAYAHAN																								
			Bidang Urusan: Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																								
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**10.828.828.261**		**6.736.264.016**		**2.266.774.200**		**191.666.703**		**0**		**0**		**275.435.464**		**243.393.711**		***11***		***6.979.657.727***		***64***	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.01.2.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**5.930.500**		**3.610.000**		**1.588.500**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		*0*		*3.610.000*		*61*	
		7.01.01.2.01.06	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja*		*5.930.500*		*3.610.000*		*1.588.500*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*3.610.000*		*61*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**9.368.036.921**		**5.781.717.308**		**1.918.373.500**		**159.506.389**		**0**		**0**		**0**		**159.506.389**		***8***		***5.941.223.697***		***63***	
		7.01.01.2.02.01	*SubKegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		*9.357.447.421*		*5.776.049.308*		*1.915.108.000*		*159.506.389*		*0*		*0*		*0*		*159.506.389*		*8*		*5.935.555.697*		*63*	
		7.01.01.2.02.05	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		*8.011.500*		*4.144.000*		*2.457.500*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*4.144.000*		*52*	
		7.01.01.2.02.07	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		*2.578.000*		*1.524.000*		*808.000*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*1.524.000*		*59*	
		7.01.01.2.05	**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			***23.935.000***		***6.544.800***		***23.050.000***		***1.488.000***		***0***		***0***		***1.400.000***		***2.888.000***		*13*		***9.432.800***		***0***	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai*		*9.050.000*		*0*		*9.050.000*		*1.288.000*		*0*		*0*		*0*									
		7.01.01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n*		*17.435.000*		*5.144.800*		*9.000.000*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*5.144.800*		*0*	
		7.01.01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi*		*6.500.000*		*1.400.000*		*5.000.000*		*200.000*		*0*		*0*		*1.400.000*		*1.600.000*		*32*		*3.000.000*		*0*	
		7.01.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**		**317.336.990**		**174.262.658**		**90.926.550**		**5.587.000**		**0**		**0**		**50.327.008**		**55.914.008**		***61***		**182.707.316**		***58***	
		7.01.01.2.06.01	*SubKegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		*53.002.600*		*34.488.050*		*15.441.500*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*34.488.050*		*65*	
		7.01.01.2.06.04	*SubKegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		*118.837.330*		*73.462.850*		*26.432.050*		*3.109.000*		*0*		*0*		-		*3.109.000*		*12*		*76.571.850*		*64*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.06.05	*SubKegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		*35.859.060*		*17.371.100*		*17.778.000*		*598.000*		*0*		*0*		-		*598.000*		*3*		*17.969.100*		*50*	
		7.01.01.2.06.06	*SubKegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		*34.710.000*		*17.860.000*		*11.360.000*		*320.000*		*0*		*0*		-		*320.000*		*3*		*18.180.000*		*52*	
		7.01.01.2.06.09	*SubKegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*63.078.000*		*28.223.000*		*14.740.000*		*1.560.000*		*0*		*0*		-		*1.560.000*		*11*		*29.783.000*		*47*	
		7.01.01.2.06.10	*SubKegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*		*11.850.000*		*2.857.658*		*5.175.000*		*0*		*0*		*0*		*2.857.658*		*2.857.658*		*55*		*5.715.316*		*48*	
		7.01.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**240.001.550**		**181.376.989**		**56.172.950**		**0**		**0**		**0**		**65.951.681**		**0**		***0***		***181.376.989***		***76***	
		7.01.01.2.07.05	*SubKegiatan: Pengadaan Mebeleur*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*		*50.674.500*		*19.424.392*		*20.936.200*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*19.424.392*		*38*	
		7.01.01.2.07.06	*SubKegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		*240.001.550*		*181.376.989*		*56.172.950*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*181.376.989*		*76*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**		**271.712.000**		**147.317.104**		**73.142.000**		**8.502.614**		**0**		**0**		**44.510.752**		**8.502.614**		***12***		***155.819.718***		***57***	
		7.01.01.2.08.01	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		*111.432.000*		*78.608.404*		*30.892.000*		*4.874.656*		*0*		*0*		-		*4.874.656*		*16*		*83.483.060*		*75*	
		7.01.01.2.08.02	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		*160.280.000*		*68.708.700*		*42.250.000*		*3.627.958*		*0*		*0*		-		*3.627.958*		*9*		*72.336.658*		*45*	
		7.01.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**		**625.810.300**		**447.979.957**		**126.570.700**		**16.582.700**		**0**		**0**		**113.246.023**		**16.582.700**		***13***		***464.562.657***		***74***	
		7.01.01.2.09.02	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*		*163.115.300*		*105.032.013*		*47.508.300*		*9.276.000*		*0*		*0*		-		*9.276.000*		*20*		*114.308.013*		*70*	
		7.01.01.2.09.06	*SubKegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		*49.028.300*		*23.345.200*		*16.550.000*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*23.345.200*		*48*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.09.09	*SubKegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*		*413.666.700*		*319.602.744*		*62.512.400*		*7.306.700*		*0*		*0*		-		*7.306.700*		*12*		*326.909.444*		*79*	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Sakip Kecamatan**		**403.083.050**		**315.804.200**		**56.268.850**		**0**		**0**		**0**		**52.520.500**		**52.520.500**		*93*		**368.324.700**		**91**	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.02.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**		**241.938.350**		**172.708.100**		**48.175.300**		**0**		**0**		**0**		**42.112.500**		*42.112.500*		*87*		*214.820.600*		*89*	
		7.01.02.2.01.01	*SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		*241.938.350*		*172.708.100*		*48.175.300*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*172.708.100*		*71*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.02.2.03	**Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti**		**15.781.700**		**10.945.000**		**4.123.350**		**0**		**0**		**0**		**7.440.000**		*7.440.000*		*180*		*18.385.000*		*116*	
		7.01.02.2.03.01	*SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*		*15.781.700*		*10.945.000*		*4.123.350*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*10.945.000*		*69*	
		7.01.02.2.04	**Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**		**145.363.000**		**132.151.100**		**3.970.200**		**0**		**0**		**0**		**2.968.000**		**2.968.000**		*75*		*135.119.100*		*93*	
		7.01.02.2.04.03	*SubKegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		*145.363.000*		*132.151.100*		*3.970.200*		*0*		*0*		*0*		*2968000*		*2.968.000*		*75*		*135.119.100*		*93*	
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik**		**243.098.300**		**182.277.850**		**37.380.550**		**0**		**0**		**0**		**17.805.500**		**0**		***0***		**182.277.850**		**75**	**Kecamatan Jatikalen**

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.03.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti**		**243.098.300**		**182.277.850**		**37.380.550**		**0**		**0**		**0**		**17.805.500**		**0**		*0*		*182.277.850*		*75*	
		7.01.03.2.01.01	*SubKegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*		*55.194.900*		*32.968.450*		*12.102.800*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*32.968.450*		*60*	
		7.01.03.2.01.02	*SubKegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*		*187.903.400*		*149.309.400*		*25.277.750*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*149.309.400*		*79*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**		**64.218.500**		**36.865.000**		**17.112.800**		**0**		**0**		**0**		**3.212.500**		**0**		*0*		*36.865.000*		*57*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.04.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti**		**64.218.500**		**36.865.000**		**17.112.800**		**0**		**0**		**0**		**3.212.500**		**0**		*0*		*36.865.000*		*57*	
		7.01.04.2.01.01	*SubKegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		*64.218.500*		*36.865.000*		*17.112.800*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*0*		*36.865.000*		*57*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**		**218.946.350**		**87.244.644**		**105.965.350**		**0**		**0**		**2.500.000**		**84.744.644**		**87.244.644**		*82*		*174.489.288*		*80*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.05.2.01	**Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**		**218.946.350**		**87.244.644**		**105.965.350**		**0**		**0**		**2.500.000**		**84.744.644**		**87.244.644**		*82*		*174.489.288*		*80*	
		7.01.05.2.01.01	*SubKegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan*		*218.946.350*		*87.244.644*		*105.965.350*		*0*		*0*		*2.500.000*		*84.744.644*		*87.244.644*		*82*		*174.489.288*		*80*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik**		**128.314.750**		**63.532.350**		**44.331.900**		**0**		**0**		**0**		**22.227.250**		**0**		*0*		*63.532.350*		*50*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.06.2.01	**Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**128.314.750**		**63.532.350**		**44.331.900**		**0**		**0**		**0**		**22.227.250**		**0**		*0*		*63.532.350*		*50*	
		7.01.06.2.01.02	*SubKegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		*94.838.400*		*47.349.350*		*35.321.700*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*47.349.350*		*50*	
		7.01.06.2.01.13	*SubKegiatan: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*		*33.476.350*		*16.183.000*		*9.010.200*		*0*		*0*		*0*		-		*0*		*0*		*16.183.000*		*48*	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023)

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Urusan: UNSUR KEWILAYAHAN																								
			Bidang Urusan: Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																								
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**81%**	**9.197.650.000**	**79,67 %**	**1.774.770.012**	**81%**	**2.450.921.500**	**83,05%**	**191.666.703**	**86,66%**	**361.555.731**		**0**		**0**	**86,66%**	**553.222.434**	**107**	***23***	**81%**	***2.327.992.446***	**81%**	***25***	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.01.2.01	**Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**	**8 laporan**	**8.178.000**	**8 laporan**	**1.568.000**	**8 laporan**	**1.588.500**	**2 laporan**	**0**	**8 laporan**	**80.000**		**0**		**0**	**8 laporan**	**80.000**	**100**	*5*	**8 laporan**	*1.648.000*	**100**	*20*	
		7.01.01.2.01.06	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja*	*8 laporan*	*8.178.000*	*8 laporan*	*1.568.000*	*8 laporan*	*1.588.500*	*8 laporan*	*0*	*8 laporan*	*80.000*		*0*		*0*	*8 laporan*	*80.000*	*100*	*5*	*8 laporan*	*1.648.000*	*100*	*20*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.02	**Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**	**31 laporan**	**2.113.051.000**	**31 laporan**	**1.499.166.548**	**31 laporan**	**2.050.969.400**	**6 laporan**	**159.506.389**	**14 laporan**	**334.854.587**		**0**		**0**	**14 laporan**	**494.360.976**	**45**	***24***	**14 laporan**	***1.993.527.524***		***94***	
		7.01.01.2.02.01	*SubKegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*12 orang/bulan*	*2.100.000.000*	*12 orang/bulan*	*1.495.950.548*	*14 orang/bulan*	*2.047.703.900*	*3 orang/bulan*	*159.506.389*	*8 orang/bulan*	*334.590.587*		*0*		*0*	*8 orang/bulan*	*494.096.976*	*57*	*24*	*8 orang/bulan*	*1.990.047.524*		*95*	
		7.01.01.2.02.05	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*	*1 laporan*	*9.298.000*	*1 laporan*	*2.460.000*	*1 laporan*	*2.457.500*	*1 laporan*	*0*	*0 laporan*	*264.000*		*0*		-	*1 laporan*	*264.000*	*100*	*11*	*1 laporan*	*2.724.000*		*29*	
		7.01.01.2.02.07	*SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*18 laporan*	*3.753.000*	*18 laporan*	*756.000*	*18 laporan*	*808.000*	*2 laporan*	*0*	*6 laporan*	*0*		*0*		-	*6 laporan*	*0*	*33*	*0*	*6 laporan*	*756.000*	*33*	***20***	
		7.01.01.2.05	**Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai***	**3 laporan**	***46.675.000***	**3 laporan**	***6.544.800***	**3 laporan**	***23.050.000***	**2 laporan**	***1.488.000***	**2 laporan**	***200.000***		***0***		***0***	**2 laporan**	***1.688.000***	***67***	*7*	**2 laporan**	***8.232.800***	***67***	***18***	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai*	*1 unit*	*7.600.000*	*1 unit*	*0*	*1 unit*	*9.050.000*	*1 unit*	*1.288.000*	*0 unit*	*0*		*0*		*0*	*1 unit*	*0*	*100*	*0*	*1 unit*	***0***	*100*	***0***	
		7.01.01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n*	*1 paket*	*14.500.000*	*1 paket*	*5.144.800*	*1 paket*	*9.000.000*	*0 paket*	*0*	*1 paket*	*0*		*0*		-	*1 paket*	*0*	*100*	*0*	*1 paket*	*5.144.800*	*100*	***35***	
		7.01.01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi*	*17 orang*	*10.000.000*	*17 orang*	*1.400.000*	*17 orang*	*5.000.000*	*4 orang*	*200.000*	*8 orang*	*200.000*		*0*		-	*8 orang*	*400.000*	*47*	*8*	*8 orang*	*1.800.000*	*47*	***18***	
		7.01.01.2.06	**Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**25 dokumen**	**370.980.000**	**25 dokumen**	**50.327.008**	**25 dokumen**	**90.926.550**	**10 dokumen**	**5.587.000**	**15 dokumen**	**19.384.500**		**0**		**0**	**15 dokumen**	**24.971.500**	**60**	**27**	**15 dokumen**	**75.298.508**	**60**	***20***	
		7.01.01.2.06.01	*SubKegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 paket*	*44.019.000*	*1 paket*	*11.195.900*	*1 paket*	*15.441.500*	*0 paket*	*0*	*1 paket*	*2.910.000*		*0*		-	*1 paket*	*2.910.000*	*100*	*19*	*1 paket*	*14.105.900*	*100*	*32*	
		7.01.01.2.06.04	*SubKegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*3 paket*	*119.902.000*	*3 paket*	*20.873.950*	*3 paket*	*26.432.050*	*1 paket*	*3.109.000*	*3 paket*	*5.542.000*		*0*		-	*3 paket*	*8.651.000*	*100*	*33*	*3 paket*	*29.524.950*	*100*	*25*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.06.05	*SubKegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang*	*2 paket*	*62.133.000*	*2 paket*	*7.219.500*	*2 paket*	*17.778.000*	*0 paket*	*598.000*	*2 paket*	*620.000*		*0*		-	*2 paket*	*1.218.000*	*100*	*7*	*2 paket*	*8.437.500*	*100*	*14*	
		7.01.01.2.06.06	*SubKegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 dokumen*	*44.550.000*	*2 dokumen*	*7.360.000*	*2 dokumen*	*11.360.000*	*2 dokumen*	*320.000*	*2 dokumen*	*2.500.000*		*0*		-	*2 dokumen*	*2.820.000*	*100*	*25*	*2 dokumen*	*10.180.000*	*100*	*23*	
		7.01.01.2.06.09	*SubKegiatan: Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi*	*5 laporan*	*82.116.000*	*5 laporan*	*820.000*	*5 laporan*	*14.740.000*	*4 laporan*	*1.560.000*	*1 laporan*	*7.812.500*		*0*		-	*5 laporan*	*9.372.500*	*100*	*64*	*5 laporan*	*10.192.500*	*100*	*12*	
		7.01.01.2.06.10	*SubKegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD*	*12 dokumen*	*18.529.000*	*12 dokumen*	*2.857.658*	*12 dokumen*	*5.175.000*	*3 dokumen*	*0*	*6 dokumen*	*0*		*0*		-	*6 dokumen*	*0*	*50*	*0*	*6 dokumen*	*2.857.658*	*50*	*15*	
		7.01.01.2.07	**Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8 unit**	**191.340.000**	**8 unit**	**65.951.681**	**8 unit**	**68.286.200**	**8 unit**	**0**	**8 unit**	**0**		**0**		**0**	**8 unit**	**0**		***0***	**8 unit**	***65.951.681***		***34***	
		7.01.01.2.07.05	*SubKegiatan: Pengadaan Mebeleur*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 unit*	*60.792.000*	*2 unit*	*9.891.892*	*2 unit*	*20.936.200*	*0 unit*	*0*	*0 unit*	*0*		*0*		-	*0 unit*	*0*	*0*	*0*	*2 unit*	*9.891.892*	*0*	*16*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.07.06	*SubKegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*6 unit*	*130.549.000*	*6 unit*	*56.059.789*	*6 unit*	*47.350.000*	*0 unit*	*0*	*3 unit*	*0*		*0*		-	*3 unit*	*0*	*50*	*0*	*3 unit*	*56.059.789*	*50*	*43*	
		7.01.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**24 laporan**	**276.830.000**	**24 laporan**	**44.510.752**	**24 laporan**	**73.142.000**	**6 laporan**	**8.502.614**	**6 laporan**	**3.526.744**		**0**		**0**	**12 laporan**	**12.029.358**	**50**	***16***	**12 laporan**	***56.540.110***	**50**	***20***	
		7.01.01.2.08.01	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 laporan*	*115.160.000*	*12 laporan*	*29.311.404*	*12 laporan*	*30.892.000*	*3 laporan*	*4.874.656*	*3 laporan*	*2.385.600*		*0*		-	*6 laporan*	*7.260.256*	*50*	*24*	*3 laporan*	*36.571.660*	*50*	*32*	
		7.01.01.2.08.02	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 laporan*	*161.670.000*	*12 laporan*	*15.199.348*	*12 laporan*	*42.250.000*	*3 laporan*	*3.627.958*	*3 laporan*	*1.141.144*		*0*		-	*6 laporan*	*4.769.102*	*50*	*11*	*3 laporan*	*19.968.450*	*50*	*12*	
		7.01.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**25 unit**	**6.237.271.000**	**25 unit**	**113.246.023**	**25 unit**	**166.008.850**	**4 unit**	**16.582.700**	**7 unit**	**3.509.900**		**0**		**0**	**7 unit**	**20.092.600**		***12***	**7 unit**	***133.338.623***		***2***	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.01.2.09.02	*SubKegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*3 unit*	*153.968.000*	*3 unit*	*34.504.000*	*3 unit*	*47.508.300*	*1 unit*	*9.276.000*	*1 unit*	*0*		*0*		-	*1 unit*	*9.276.000*	*33*	*20*	*1 unit*	*43.780.000*	*33*	*28*	
		7.01.01.2.09.06	*SubKegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*21 unit*	*27.728.000*	*21 unit*	*9.490.000*	*21 unit*	*16.550.000*	*0 unit*	*0*	*3 unit*	*0*		*0*		-	*3 unit*	*0*	*14*	*0*	*3 unit*	*9.490.000*	*14*	*34*	
		7.01.01.2.09.09	*SubKegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*	*255.569.000*	*1 unit*	*69.252.023*	*1 unit*	*101.950.550*	*1 unit*	*7.306.700*	*1 unit*	*3.509.900*		*0*		-	*1 unit*	*10.816.600*	*100*	*11*	*1 unit*	*80.068.623*	*100*	*31*	
	Nilai Sakip Kecamatan	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan**	**88%**	**281.257.000**	**88%**	**52.520.500**	**88%**	**56.268.850**	**22%**	**0**	**44%**	**3.302.800**		**0**		**0**	**44%**	**3.302.800**	**50**	*6*	**44%**	**55.823.300**	**50**	**20**	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.02.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal**	**4 kegiatan**	**196.624.000**	**4 kegiatan**	**42.112.500**	**4 kegiatan**	**48.175.300**	**2 kegiatan**	**0**	**2 kegiatan**	**3.037.800**		**0**		**0**	**2 kegiatan**	*3.037.800*	**50**	*6*	**2 kegiatan**	*45.150.300*	**50**	*23*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.02.2.01.01	*SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	*4 laporan*	*196.624.000*	*4 laporan*	*42.112.500*	*4 laporan*	*48.175.300*	*2 laporan*	*0*	*2 laporan*	*3.037.800*		*0*		*0*	*2 laporan*	*3.037.800*	*50*	*6*	*2 laporan*	*45.150.300*	*50*	*23*	
		7.01.02.2.03	**Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	**1 dokumen**	**23.877.000**	**1 dokumen**	**7.440.000**	**1 dokumen**	**4.123.350**	**0 dokumen**	**0**	**0 dokumen**	**0**		**0**		**0**	**0 dokumen**	*0*	**0**	*0*	**0 dokumen**	*7.440.000*	**0**	*31*	
		7.01.02.2.03.01	*SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	*Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	*1 dokumen*	*23.877.000*	*1 dokumen*	*7.440.000*	*1 dokumen*	*4.123.350*	*0 dokumen*	*0*	*0 dokumen*	*0*		*0*		*-*	*0 dokumen*	*0*	*0*	*0*	*0 dokumen*	*7.440.000*	*0*	*31*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.02.2.04	**Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**1 laporan**	**60.756.000**	**1 laporan**	**2.968.000**	**1 laporan**	**3.970.200**	**0 laporan**	**0**	**1 laporan**	**265.000**		**0**		**0**	**1 laporan**	**265.000**	**100**	*7*	**1 laporan**	*3.233.000*	**100**	*5*	
		7.01.02.2.04.03	*SubKegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*1 laporan*	*60.756.000*	*1 laporan*	*2.968.000*	*1 laporan*	*3.970.200*	*0 laporan*	*0*	*1 laporan*	*265.000*		*0*		*0*	*1 laporan*	*265.000*	*100*	*7*	*1 laporan*	*3.233.000*	*100*	*5*	
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**88%**	**126.001.000**	**88%**	**17.805.500**	**88%**	**37.380.550**	**50%**	**0**	**60%**	**6.676.500**		**0**		**0**	**60%**	**6.676.500**	**68**	***18***	**60%**	**24.482.000**	**68**	**19**	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.03.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**2 kagiatan**	**126.001.000**	**2 kagiatan**	**17.805.500**	**2 kagiatan**	**37.380.550**	**2 kagiatan**	**0**	**1 kagiatan**	**6.676.500**		**0**		**0**	**1 kagiatan**	**6.676.500**	**100**	*18*	**1 kagiatan**	*24.482.000*	**100**	*19*	
		7.01.03.2.01.01	*SubKegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	*5 lembaga kemsyarakatan*	*76.866.000*	*5 lembaga kemsyarakatan*	*6.649.500*	*5 lembaga kemsyarakatan*	*12.102.800*	*5 lembaga kemsyarakatan*	*0*	*0 lembaga kemsyarakatan*	*6.676.500*		*0*		-	*5 lembaga kemsyarakatan*	*6.676.500*	*100*	*55*	*5 lembaga kemsyarakatan*	*13.326.000*	*100*	*17*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.03.2.01.02	*SubKegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja*	*12 dokumen*	*49.135.000*	*12 dokumen*	*11.156.000*	*12 dokumen*	*25.277.750*	*3 dokumen*	*0*	*3 dokumen*	*0*		*0*		-	*3 dokumen*	*0*	*25*	*0*	*3 dokumen*	*11.156.000*	*25*	*23*	
		7.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**	**88%**	**69.363.000**	**88%**	**3.212.500**	**88%**	**17.112.800**	**0%**	**0**	**44%**	**0**		**0**		**0**	**44%**	**0**	**50**	*0*	**44%**	*3.212.500*	**50**	*5*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.04.2.01	**Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**	**3 kegiatan**	**69.363.000**	**3 kegiatan**	**3.212.500**	**3 kegiatan**	**17.112.800**	**0 kegiatan**	**0**	**3 kegiatan**	**0**		**0**		**0**	**3 kegiatan**	**0**	**100**	*0*	**3 kegiatan**	*3.212.500*	**100**	*5*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.04.2.01.01	*SubKegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*3 laporan*	*69.363.000*	*3 laporan*	*3.212.500*	*3 laporan*	*17.112.800*	*0 laporan*	*0*	*3 laporan*	*0*		*0*		*0*	*3 laporan*	*0*	*100*	*0*	*3 laporan*	*3.212.500*	*100*	*5*	
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**88%**	**73.515.000**	**88%**	**87.244.644**	**88%**	**27.415.350**	**44%**	**0**	**88%**	**0**		**0**		**0**	**88%**	**0**	**100**	*0*	**88%**	*87.244.644*	**100**	*119*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.05.2.01	**Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**100 orang**	**73.515.000**	**100 orang**	**87.244.644**	**100 orang**	**27.415.350**	**50 orang**	**0**	**100 orang**	**0**		**0**		**0**	**100 orang**	**0**	**100**	*0*	**100 orang**	*87.244.644*	**100**	*119*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.05.2.01.01	*SubKegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan*	*100 orang*	*73.515.000*	*100 orang*	*87.244.644*	*100 orang*	*27.415.350*	*50 orang*	*0*	*100 orang*	*0*		*0*		-	*100 orang*	*0*	*100*	*0*	*100 orang*	*87.244.644*	*100*	*119*	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**88%**	**155.465.000**	**88%**	**22.227.250**	**88%**	**44.331.900**	**20%**	**0**	**40%**	**2.585.000**		**0**		**0**	**88%**	**2.585.000**	**88%**	*6*	**88%**	*24.812.250*	**88%**	*16*	**Kecamatan Jatikalen**
		7.01.06.2.01	**Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8 dokumen**	**155.465.000**	**8 dokumen**	**22.227.250**	**8 dokumen**	**44.331.900**	**0 dokumen**	**0**	**2 dokumen**	**2.585.000**		**0**	**88%**	**0**	**2 dokumen**	**2.585.000**	**25**	*6*	**2 dokumen**	*24.812.250*	**25**	*16*	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Subkegiatan(Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d tahun 2023 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d.RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/6 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x 100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.01.06.2.01.02	*SubKegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	*6 dokumen*	*108.099.000*	*6 dokumen*	*15.955.750*	*6 dokumen*	*35.321.700*	*0 dokumen*	*0*	*2 dokumen*	*2.585.000*		*0*		-	*2 dokumen*	*2.585.000*	*33*	*7*	*2 dokumen*	*18.540.750*	*33*	*17*	
		7.01.06.2.01.13	*SubKegiatan: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	*2 dokumen*	*47.366.000*	*2 dokumen*	*6.271.500*	*2 dokumen*	*9.010.200*	*0 dokumen*	*0*	*0 dokumen*	*0*		*0*		-	*0 dokumen*	*0*	*0*	*0*	*0 dokumen*	*6.271.500*	*0*	*13*	

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN KECAMATAN JATIKALEN TRIBULAN III TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Kasih sayangNya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan III Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana diharapkan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ini Rencana Kerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ini bermaksud untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan bertujuan untuk penilaian kinerja outcome program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kerja dan keuangan pada Kecamatan Jatikalen, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatikalen, merumuskan rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut yang akan dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Dengan selesainya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tribulan III Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah pada masa yang akan datang. Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, sehingga demi kesempurnaan laporan ini, kami berharap saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Kecamatan Jatiaklen Kabupaten Nganjuk kedepannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023
II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
IV.2. Tindak Lanjut

BAB I
PENDAHULUAN

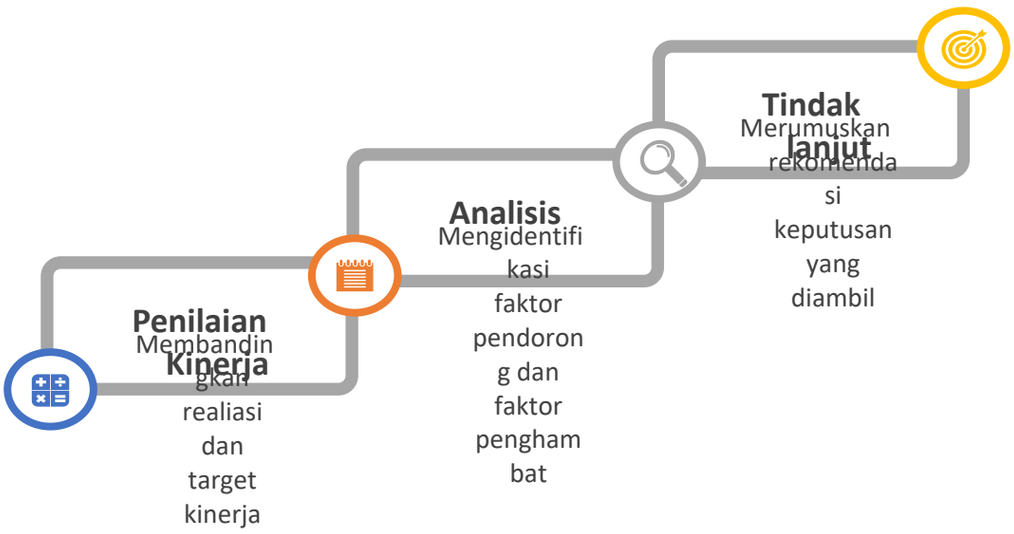
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

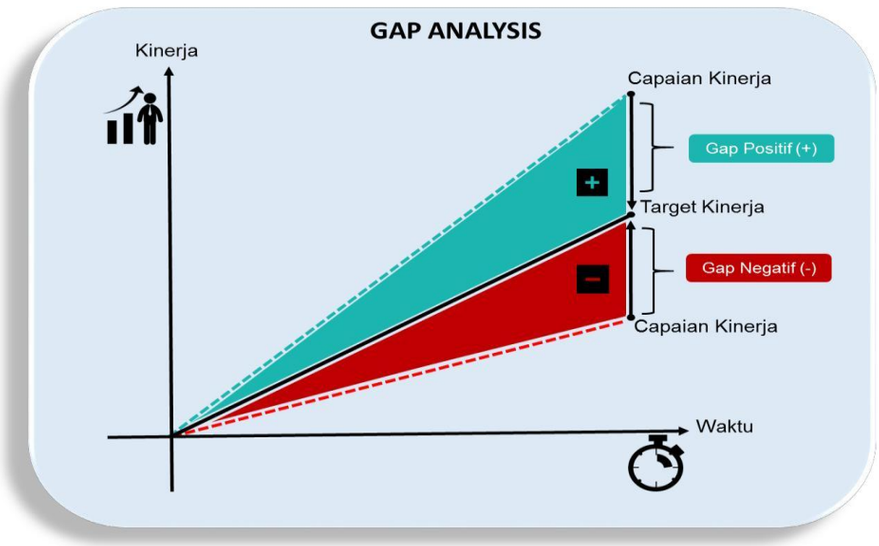
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

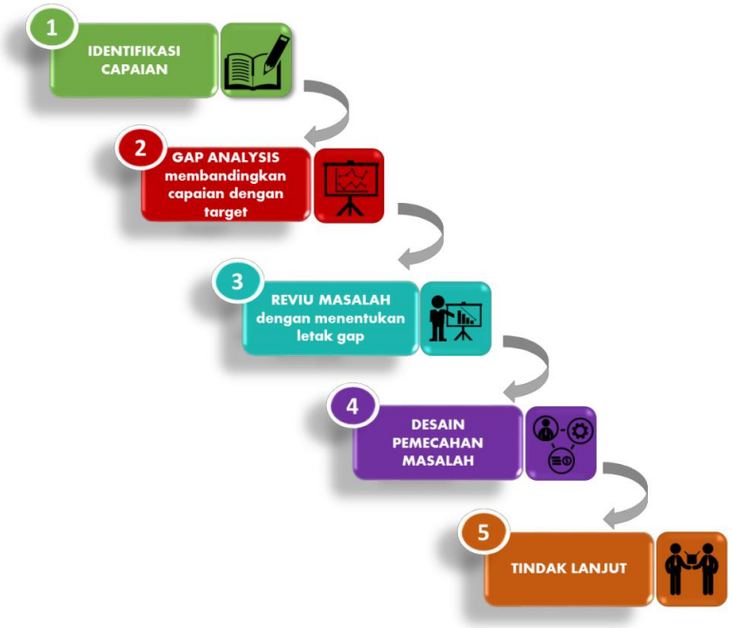
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif

5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik	76,32	100%
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Kinerja Tahun 2023**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81	87,71	108,28 %
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70	74,65	106,64 %
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88	100	113,63 %

Sampai dengan Tribulan III Tahun Anggaran 2023, realisasi kinerja dari Tujuan Kecamatan Jatikalen yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik” dengan indikator “Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan” adalah 76,32 atau dengan predikat “Baik” sehingga sudah sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Adapun Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

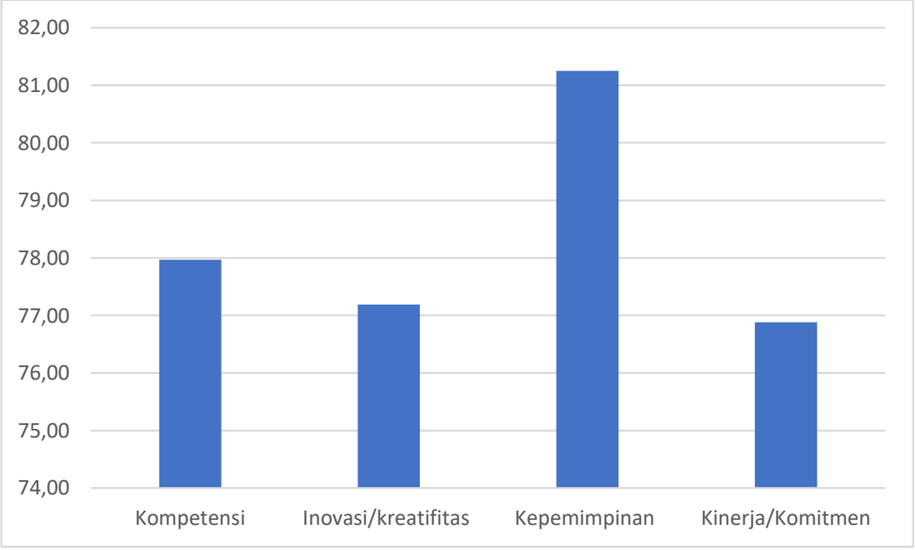
Dengan indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Jatikalen adalah 76,32 dengan rincian komponen sebagai berikut :

Grafik 2.1

Hasil Nilai Sinergitas Kecamatan Jatiaklen



Berdasarkan grafik 2.1. diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penilaian sinergitas kecamatan ternyata pada indikator Kinerja/Komitmen belum optimal. Hal ini karena kurang maksimalnya kinerja/komitmen ASN di Kecamatan Jatikalen dalam melaksanakan tupoksinya sehingga berdampak pada kinerja yang rendah.

Pada Sasaran ke-1, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat”, dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, dengan target sebesar 81 %, terealisasi sebesar 84,45%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tribulan III TA.2023 ini sebesar 104,25%. Nilai IKM sebesar 87,71 diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I (periode Januari 2023 s.d Maret 2023) dengan jumlah responden 115 orang, Tribulan II (periode April 2023 s.d. Juni 2023) dengan jumlah responden 89 orang, dan Tribulan III (periode Juli 2023 s.d. September 2023) dengan jumlah responden 48 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui handphone masing-masing responden. Dan responden harus mengisi kuisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan

Mneteri Pendayagunaan AParatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

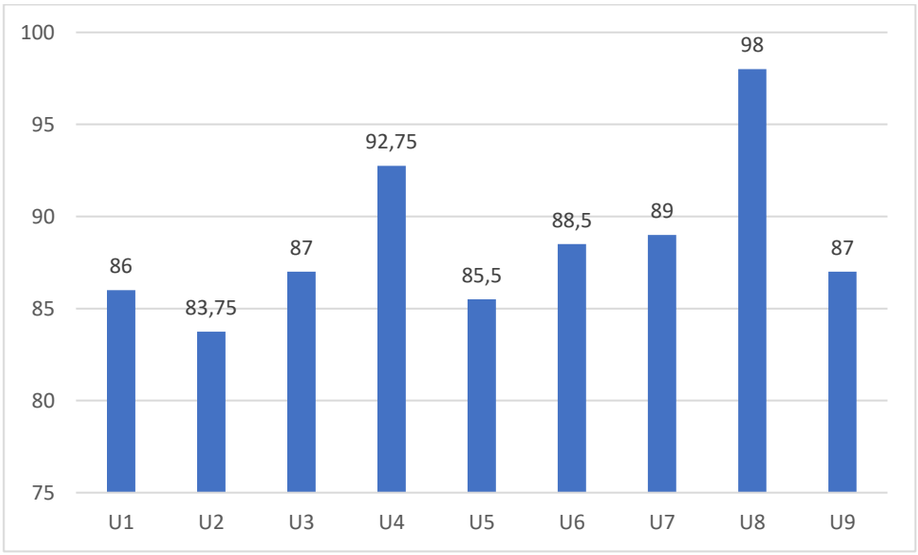
Tabel 2.1

Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	84,08	83,18	87,71

Grafik 2.2

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah Tribulan III



Keterangan :

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari grafik 2.2 diatas dapat diketahui bahwa ke-9 unsur IKM yang mempunyai hasil terendah adalah pada U2 yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Dari hal itu dapat diketahui bahwa bagi masyarakat, kepuasan sangat rendah ada pada Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang dapat dianalisa bahwa Sistem, Mekanisme dan Prosedur

pelayanan pada Kecamatan Jatikalen kurang cepat, kurang praktis dan kurang sederhana.

Pada Sasaran ke-2, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan” dengan indikator “Nilai Sakip Kecamatan” dengan target nilai sebesar 70, terealisasi sebesar 74,65, sehingga capaian kinerja sampai dengan tribulan III TA.2023 ini sebesar 106,64%. Adapun nilai sebesar 74,65 diperoleh melalui penilaian/evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Tim Penilai SAKIP dari Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75
	Total	**100%**	**74,65**

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada komponen Pelaporan Kinerja, nilainya paling rendah yaitu 11,10. Hal itu terjadi karena masih belum sempurnanya Laporan Kinerja ASN dan Laporan LKjIP sehingga menyebabkan nilai menjadi rendah.

Sedangkan pada Sasaran ke-3, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”, dengan indikator “Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan target nilai sebesar 88%, terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tribulan III TA.2023 ini sebesar 113,63%.

Untuk mengetahui desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator/instrumen yang diambil dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui Aplikasi Epdeskel Kemendagri yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.

Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada di dalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Desa Kurang Berkembang (nilai <= 300)
2. Desa Berkembang (nilai 301-450)
3. Desa Cepat Berkembang (nilai >= 451)

Berdasarkan indikator pada Aplikasi Epdeskel tersebut, maka jumlah desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik berjumlah 11 desa di Kecamatan Jatikalen sehingga dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Total Nilai	Status
1	Perning	201	62	190	453	Cepat Berkembang
2	Ngasem	215	87	192	494	Cepat Berkembang
3	Gondangwetan	150	63	164	377	Berkembang
4	Jatikalen	205	69	181	455	Cepat Berkembang
5	Lumpangkuwik	216	86	190	492	Cepat Berkembang
6	Dlururejo	194	72	184	450	Berkembang
7	Dawuhan	215	76	189	480	Cepat Berkembang
8	Begendeng	200	79	175	454	Cepat Berkembang
9	Pulowetan	210	88	183	481	Cepat Berkembang
10	Munung	221	81	191	493	Cepat Berkembang
11	Pule	198	71	182	451	Cepat Berkembang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 9 (sembilan) desa sudah mempunyai status Desa Cepat Berkembang dan sebanyak 2 (dua) Desa dengan Status Berkembang. Sehingga dari status desa tersebut dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) Desa sudah masuk kedalam penerapan tata Kelola desa yang baik.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah***	81%	**2.450.921.500**	84,45%	**1.028.063.285**	104,25	**41,94%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD***	8 laporan	**1.588.500**	6 laporan	**898.000**	75 %	**56,53**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	8 laporan	1.588.500	6 laporan	898.000	75 %	56,53
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tersedianya Laporan Keuangan SKPD***	31 laporan	**2.050.969.400**	24 laporan	**867854609**	77,41%	**42,31**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	14 orang/ bulan	2.047.703.900	11 orang/ bulan	867.004.609	78,57 %	42,34

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	2.457.500	1 laporan	264.000	100%	10,74%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18 laporan	808.000	14 laporan	568.000	77,77%	72,52%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai*	3 laporan	23.050.000	1 laporan	6.464.000	33,33%	28,04%
	Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang meningkat	1 unit	9.050.000	1 unit	3.864.000	100%	42,70%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	1 paket	9.000.000	1 paket	1.800.000	100%	20,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur perencana dan peneliti yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	17 orang	5.000.000	8 orang	800.000	47,05%	16 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD***	25 laporan	**90.926.550**	11 laporan	**39.904.400**	44%	**43,89%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	15.441.500	1 paket	6.497.500	100%	42,08 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	3 paket	26.432.050	3 paket	13.318.000	100%	50,39%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	17.778.000	2 paket	1.486.400	100%	8,36 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2 dokumen	11.360.000	2 dokumen	5.320.000	100%	46,83 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 laporan	14.740.000	5 laporan	9.782.500	100%	66,37 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	12 dokumen	5.175.000	9 dokumen	3.500.000	75%	67,63 %

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah***	8 unit	**68.286.200**	4 unit	**22.850.000**	50%	**33,46%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 paket	20.936.200	1 paket	14.000.000	50%	66,87%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	6 unit	47.350.000	3 unit	8.850.000	50%	18,69 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	24 laporan	**73.142.000**	18 laporan	**28.706.696**	75%	**39,25 %**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	12 laporan	30.892.000	9 laporan	18.231.334	75%	59,02 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12 laporan	42.250.000	9 laporan	10.475.362	75%	24,79 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah***	25 unit	**166.008.850**	18 unit	**61.385.580**	72%	**36,98 %**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	3 unit	47.508.300	3 unit	28.773.980	100 %	60,57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	21 unit	16.550.000	6 unit	250.000	28,57 %	1,51 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	1 unit	101.950.550	1 unit	32.361.600	100%	31,74 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan***	88%	**56.268.850**	66%	**9.171.800**	75%	**16,30%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal***	4 kegiatan	**48.175.300**	3 kegiatan	**8.202.800**	75%	**17,03%**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan	4 laporan	48.175.300	3 kegiatan	8.202.800	75%	17,03%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	1 dokumen	**4.123.350**	0 dokumen	**0**	0%	**0%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	1 dokumen	4.123.350	0 dokumen	0	0%	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan***	1 laporan	**3.970.200**	1 laporan	**969.000**	100%	**24,41%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3.970.200	1 laporan	969.000	100%	24,41%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	88%	**37.380.550**	80%	**7.501.500**	90,90%	**20,07 %**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan***	2 kegiatan	**37.380.550**	80%	**7.501.500**	90,90%	**20,07 %**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga kemasyarakatn	12.102.800	5 lembaga kemasyarakatn	6.676.500	100%	55,16 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 dokumen	25.277.750	9 dokumen	825.000	75%	3,26

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	88%	**17.112.800**	66%	**5.820.000**	75%	**34,01**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI***	3 kegiatan	**17.112.800**	66%	**5.820.000**	75%	**34,01**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	17.112.800	66%	5.820.000	75%	34,01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	88%	**105.965.350**	88%	**96.884.300**	100%	**91,43**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan***	100 orang	**105.965.350**	88%	**96.884.300**	100%	**91,43**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	100 orang	105.965.350	88%	96.884.300	100%	91,43
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	88%	**44.331.900**	50%	**2.585.000**	56,81%	**5,83 %**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	8 kegiatan	**44.331.900**	4 kegiatan	**2.585.000**	56,81%	**5,83 %**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	6 dokumen	35.321.700	4 dokumen	2.585.000	66,66 %	7,32 %
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	9.010.200	0 dokumen	0	0 %	0 %

A. Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tribulan III Tahun 2023 ini, di Kecamatan Jatikalen yang mempunyai kinerja masih rendah adalah pada *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*, dengan Capaian Kinerja yaitu 56,81%, hal ini terjadi karena kurangnya SDM yang melaksanakan tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana terjadi kekosongan SDM pada seksi tersebut, baik Kepala Seksi maupun Pelaksana, sehingga Kinerja menjadi tidak maksimal. Dan untuk sementara kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di rangkap oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Analisis Realisasi Output Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel dapat diketahui bahwa ada beberapa Kegiatan dan Subkegiatan yang hasil Capaian Kinerjanya SANGAT TINGGI, yaitu lebih dari 90%, antara lain Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Hal ini dapat terjadi karena PPTK bertanggungjawab penuh terhadap tupoksi yang sudah diberikan sehingga melaksanakan tupoksi sesuai rencana kinerja yang sudah ditargetkan.

Sedangkan ada beberapa Kegiatan dan SubKegiatan yang hasil Capaiannya TINGGI yaitu sekitar 76% s.d.90%, yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Hal ini dapat terjadi karena Pengelola Keuangan dan Pengelola Program dan Laporan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan sehingga sehingga Laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dan ada beberapa Kegiatan dan SubKegiatan yang hasil Capaiannya SEDANG, yaitu sekitar 66% s.d. 75%, antara lain pada SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Hal ini terjadi karena Kegiatan masih berada di Tribulan III sehingga belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Sedangkan beberapa Kegiata Kegiatan dan SubKegiatan yang hasil Capaiannya RENDAH yaitu kurang dari 50%, antara lain :

- Kegiatan *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini terjadi karena OPD Pengampu di Kabupaten Nganjuk selaku Leading Sector tidak melaksanakan kegiatan pelatihan sehingga kinerja tidak tercapai maksimal
- Kegiatan *Administrasi Umum Perangkat Daerah* SubKegiatan Pengadaan Mebel. Hal ini terjadi karena dari 2 paket yang direncanakan pada Renja, ternyata di DPA hanya 1 paket yang dianggarkan sehingga hanya 1 paket yang direalisasikan. Dan SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Hal ini terjadi karena dari 6 unit yang direncanakan, hanya 3 yang dapat direalisasikan karena mengalami pergeseran anggaran.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Hal ini terjadi karena kondisi peralatan dan mesin masih baik sehingga tidak memerlukan perbaikan atau servis.
- Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran sehingga yang rencana awalnya mau dibuat backdrop akhirnya tidak jadi karena anggaran untuk pembuatan backdrop di geser ke anggaran lain.
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa SubKegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM yang melaksanakan tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana terjadi kekosongan jabatan pada seksi tersebut, baik Kepala Seksi maupun Pelaksana, sehingga Kinerja menjadi tidak maksimal. Dan untuk sementara kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di rangkap oleh Sekretaris Kecamatan

C. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

Realisasi Keuangan sampai dengan Tribulan III tahun 2023 atau per 30 September 2023 sebesar Rp1.150.025.885,- atau telah mencapai 44,87% yaitu dari anggaran sebesar Rp2.562.996.900,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh Program/Kegiatan/SubKegiatan masih mempunyai serapan yang rendah atau kurang dari 50%. Capaian yang rendah terjadi karena beberapa sebab, antara lain :

1. Kurangnya SDM di Kecamatan Jatikalen, sehingga banyak ASN yang tugasnya merangkap dengan tugas yang lain, sehingga proses realisasi menjadi lambat dan tertunda
2. Adanya pergeseran anggaran dan menunggu pengesahan PAK di Tribulan IV Tahun 2023.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	-	▪ Nilai target yang satuannya tidak sama dengan realisasi, sehingga tidak dapat dihitung secara tepat ▪ Kinerja/komitmen yang rendah sehingga tidak dapat bekerja sesuai tupoksinya
No.	**Sasaran Perangkat Daerah**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	-	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang masih berjalan kurang sederhana dan masih panjang
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	-	Pembuatan Laporan Kinerja ASN dan LKjIP yang belum sempurna
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Adanya kekompakan Tim dari Kecamatan dalam melakukan monev ke desa-desa	Kurang tertibnya desa terhadap tata kelola administrasi desa

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Mempunyai SOP yang jelas 2. Adanya pelayanan prima (excellent servis) kepada masyarakat 3. Kompetensi SDM khususnya petugas pelayanan	Kesediaan pelanggan dalam mengisi kuisioner
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Adanya sistem perencanaan yang efektif	Kurangnya data atau informasi yang akurat

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Daerah	dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Penggunaan sistem administrasi kepegawaian yang efisien untuk mengelola data dan proses administrasi	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi kepegawaian
	Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengadaan pakaian dinas dan atributnya	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	OPD Pengampu tidak mengadakan pelatihan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan penggandaan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Adanya anggaran yang memadai dapat memperlancar kinerja perjalanan dinas
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Kurang terjaganya arsip-arsip pada OPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memahami kebutuhan yang sesuai untuk meingkatkan efisiensi	Kurangnya pemahaman tentang teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Memahami bahwa kerja sama dengan instansi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Koordinasi memerlukan waktu dan sumber daya dan kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Konflik kepentingan antara instansi atau tingkat pemerintahan dapat menghambat sinergi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kecamatan	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja,

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		yang terlibat dalam pemberdayaan desa	dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semangat kerja sama dari semua pihak yang terlibat	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	-

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	elatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	-

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwewenang memerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan III Tahun 2023 ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, diharapkan laporan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pad komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan agar tercipta pelayanan prima yang efektif dan efisien.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan III Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan

IV.2. Tindak Lanjut

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	▪ Nilai target yang satuannya tidak sama dengan realisasi, sehingga tidak dapat dihitung secara tepat ▪ Kinerja/komitmen yang rendah sehingga tidak dapat bekerja sesuai tupoksinya	▪ Menyamakan satuan target sehingga dapat dihitung secara tepat ▪ Adanya komitmen bersama antar stakeholder di Kecamatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dalam pelayanan yang masih berjalan kurang sederhana dan masih panjang	Mempersingkat dan memperpendek alur pelayanan
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Pembuatan Laporan Kinerja ASN dan LKjIP yang belum sempurna	Menyempurnakan Laporan Kinerja
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Kurang tertibnya desa terhadap tata kelola administrasi desa	Sering dilakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa terkait tata kelola administrasi desa secara terjadwal

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN KECAMATAN JATIKALEN TRIBULAN IV TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Kasih sayangNya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana diharapkan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ini Rencana Kerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk ini bermaksud untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan bertujuan untuk penilaian kinerja outcome program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kerja dan keuangan pada Kecamatan Jatikalen, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatikalen, merumuskan rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut yang akan dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Dengan selesainya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tribulan IV Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah pada masa yang akan datang. Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan, sehingga demi kesempurnaan laporan ini, kami berharap saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Kecamatan Jatiaklen Kabupaten Nganjuk kedepannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023
II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP
IV.1. Kesimpulan
IV.2. Tindak Lanjut

BAB I
PENDAHULUAN

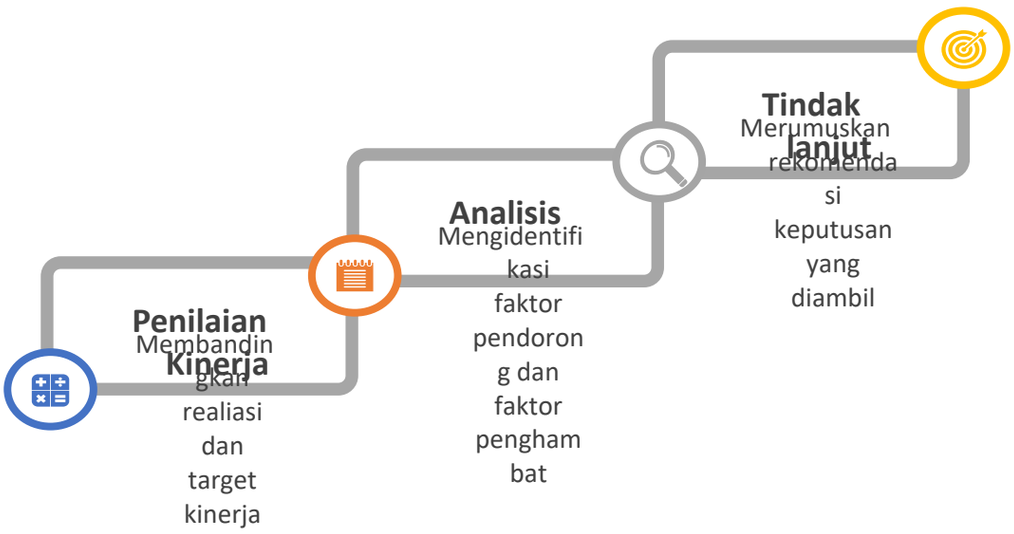
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai triwulan III melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2023, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

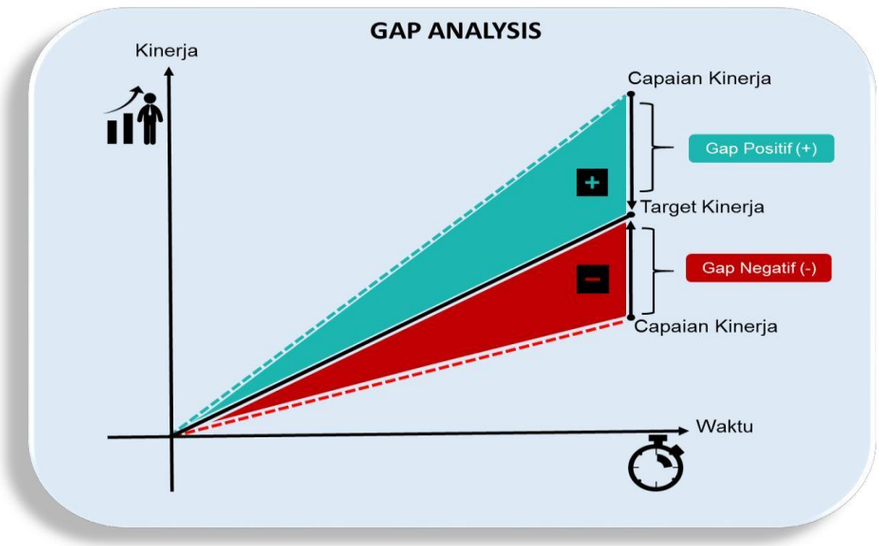
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

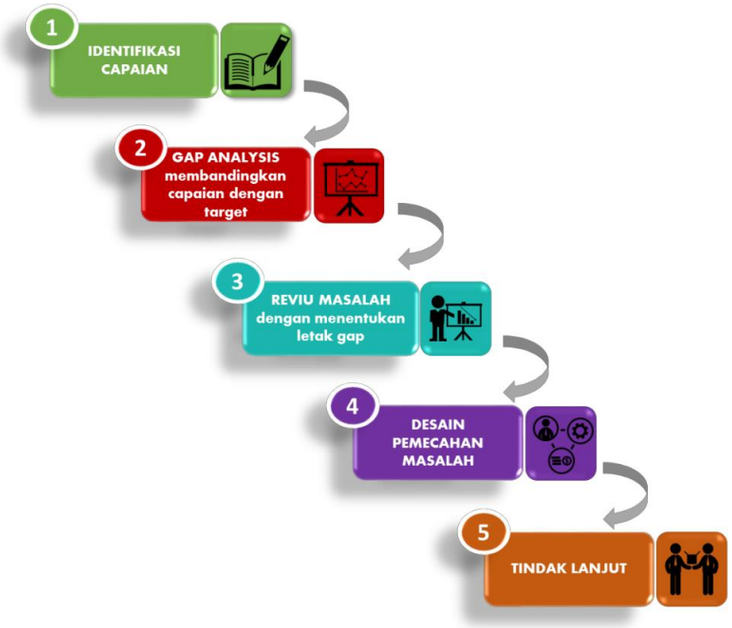
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif

5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Baik	74,42	100%
No.	**Sasaran**	**Indikator**	**Kinerja Tahun 2023**		
			Target	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81	87,21	107,66 %
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	70	74,65	106,64 %
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88	100	113,63 %

Sampai dengan Tribulan IV Tahun Anggaran 2023, realisasi kinerja dari Tujuan Kecamatan Jatikalen yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik” dengan indikator “Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan” adalah 74,42 atau dengan predikat “Baik” sehingga sudah sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Adapun Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dengan indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Pada Sasaran ke-1, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat”, dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, dengan target sebesar 81 %, terealisasi sebesar 90,36 %, sehingga capaian kinerja sampai dengan Tribulan IV TA.2023 ini sebesar 111,55 %. Nilai IKM sebesar 90,36% diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I (periode Januari 2023 s.d Maret 2023) dengan jumlah responden 115 orang, Tribulan II (periode April 2023 s.d. Juni 2023) dengan jumlah responden 89 orang, Tribulan III (periode Juli 2023 s.d. September 2023) dengan jumlah responden 48 orang, dan Tribulan IV (periode Oktober s.d. Desember 2023) dengan jumlah responden 220 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui handphone masing-masing responden. Dan responden harus mengisi kuisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Mneteri Pendayagunaan AParatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

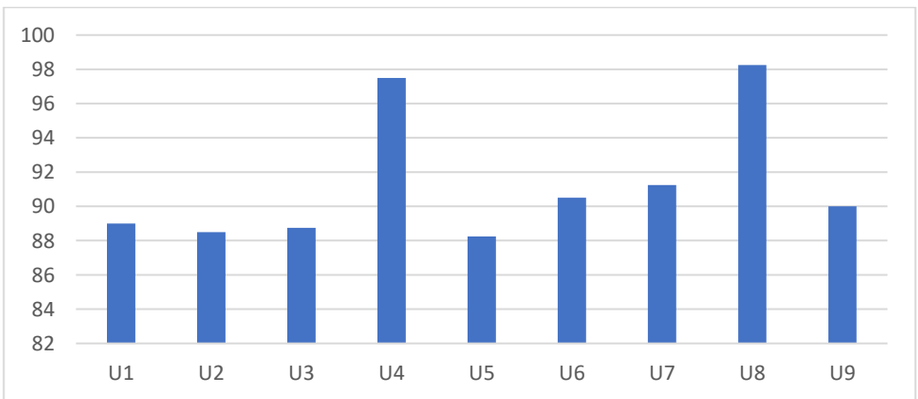
Tabel 2.1

Perkembangan Capaian Kinerja Per Tribulan

No	Indikator Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	84,08	83,18	87,71	90,36

Grafik 2.1

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah Tribulan IV



Keterangan :

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari grafik 2.2 diatas dapat diketahui bahwa ke-9 unsur IKM yang mempunyai hasil terendah adalah pada U2 yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Dari hal itu dapat diketahui bahwa bagi masyarakat, kepuasan sangat rendah ada pada Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang dapat dianalisa bahwa Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan pada Kecamatan Jatikalen kurang cepat, kurang praktis dan kurang sederhana.

Pada Sasaran ke-2, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan” dengan indikator “Nilai Sakip Kecamatan” dengan target nilai sebesar 70, terealisasi sebesar 74,65, sehingga capaian kinerja sampai dengan tribulan III TA.2023 ini sebesar 106,64%. Adapun nilai sebesar 74,65 diperoleh melalui penilaian/evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Tim Penilai SAKIP dari Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75
	Total	**100%**	**74,65**

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada komponen Pelaporan Kinerja, nilainya paling rendah yaitu 11,10. Hal itu terjadi karena masih belum sempurnanya Laporan Kinerja ASN dan Laporan LKjIP sehingga menyebabkan nilai menjadi rendah.

Sedangkan pada Sasaran ke-3, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”, dengan indikator “Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan target nilai sebesar 88%, terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sampai dengan tribulan IV TA.2023 ini sebesar 113,63%.

Untuk mengetahui desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator/instrumen yang diambil dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan sebagaimana Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui Aplikasi Epdeskel Kemendagri yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa.

Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada di dalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori yaitu :

1. Desa Kurang Berkembang (nilai <= 300)
2. Desa Berkembang (nilai 301-450)
3. Desa Cepat Berkembang (nilai >= 451)

Berdasarkan indikator pada Aplikasi Epdeskel tersebut, maka jumlah desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik berjumlah 11 desa di Kecamatan Jatikalen sehingga dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Desa	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Total Nilai	Status
1	Perning	201	62	190	453	Cepat Berkembang
2	Ngasem	215	87	192	494	Cepat Berkembang
3	Gondangwetan	150	63	164	377	Berkembang
4	Jatikalen	205	69	181	455	Cepat Berkembang
5	Lumpangkuwik	216	86	190	492	Cepat Berkembang
6	Dlururejo	194	72	184	450	Berkembang
7	Dawuhan	215	76	189	480	Cepat Berkembang
8	Begendeng	200	79	175	454	Cepat Berkembang
9	Pulowetan	210	88	183	481	Cepat Berkembang
10	Munung	221	81	191	493	Cepat Berkembang
11	Pule	198	71	182	451	Cepat Berkembang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 9 (sembilan) desa sudah mempunyai status Desa Cepat Berkembang dan sebanyak 2 (dua) Desa dengan Status Berkembang. Sehingga dari status desa tersebut dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) Desa sudah masuk kedalam penerapan tata Kelola desa yang baik.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah***	81%	**2.306.298.590**	84,45%	**1.539.326.640**	104,25	**66,74%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD***	8 laporan	**3.420.000**	8 laporan	**3.412.000**	75 %	**99,77 %**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	8 laporan	3.420.000	8 laporan	3.412.000	75 %	99,77%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tersedianya Laporan Keuangan SKPD***	31 laporan	**1.897.823.990**	31 laporan	**1.225.808.750**	77,41%	**64,59%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	14 orang/ bulan	1.894.859.990	14 orang/ bulan	1.222.874.750	78,57 %	64,54%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	684.000	1 laporan	660.000	100%	96,49%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18 laporan	2.280.000	18 laporan	2.274.000	77,77%	99,74%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	***Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai***	3 laporan	26.150.000	1 laporan	20.602.000	33,33%	78.78%
	Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang meningkat	1 unit	9.050.000	1 unit	7.182.000	100%	79,36%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	1 paket	12.100.000	1 paket	11.920.000	100%	98,51%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur perencana dan peneliti yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	17 orang	5.000.000	8 orang	1.500.000	47,05%	30 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD***	25 laporan	**120.105.700**	25 laporan	**84.384.355**	95,83%	**70,26%**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 paket	12.913.800	1 paket	12.876.500	100%	99,71 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	4 paket	51.918.900	3 paket	34.237.775	75%	65,94%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	9.678.000	2 paket	4.708.580	100%	48,65 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2 dokumen	11.360.000	2 dokumen	11.270.000	100%	99,21 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 laporan	29.060.000	5 laporan	17.791.500	100%	61,22 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	12 dokumen	5.175.000	12 dokumen	3.500.000	100%	67,63 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah***	8 unit	**43.936.200**	8 unit	**39.850.000**	100%	**90,70%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 paket	20.936.200	2 paket	14.000.000	100%	66,87%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	6 unit	26.000.000	6 unit	25.850.000	100%	99,42 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tersedianya Jasa Penunjang SKPD***	24 laporan	**74.042.000**	24 laporan	**44.955.075**	100%	**60,72 %**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	12 laporan	31.792.000	12 laporan	29.020.409	100%	91,28 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12 laporan	42.250.000	12 laporan	15.934.666	100%	37,72 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah***	25 unit	**137.820.700**	25 unit	**120.314.460**	100%	**87,30 %**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	3 unit	62.133.300	3 unit	61.196.660	100 %	98,49%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	21 unit	8.050.000	21 unit	8.025.000	100 %	99,69 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	1 unit	67.637.400	1 unit	51.092.800	100%	75,54 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	***Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan***	88%	**37.383.850**	66%	**37.262.850**	75%	**99,68%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal***	4 kegiatan	**27.850.300**	4 kegiatan	**27.806.500**	100%	**99,84%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan	4 laporan	27.850.300	4 kegiatan	27.806.500	100%	99,84%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	1 dokumen	**1.123.350**	1 dokumen	**1.123.350**	100%	**100%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana	1 dokumen	**1.123.350**	1 dokumen	**1.123.350**	100%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan***	1 laporan	**8.410.200**	1 laporan	**8.333.000**	100%	**99,08%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	8.410.200	1 laporan	8.333.000	100%	99,08%

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	88%	**39.880.550**	100%	**38.067.200**	90,90%	**95,45 %**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan***	2 kegiatan	**39.880.550**	2 kegiatan	**38.067.200**	100%	**95,45 %**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga kemasyarakatn	12.102.800	5 lembaga kemasyarakatn	11.076.500	100%	91,52 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 dokumen	27.777.750	12 dokumen	26.990.700	100%	97,17%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	88%	**22.412.800**	66%	**21.260.300**	75%	**94,86**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI***	3 kegiatan	**22.412.800**	3 kegiatan	**21.260.300**	100%	**94,86**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	**22.412.800**	3 laporan	**21.260.300**	100%	94,86
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	88%	**105.965.350**	88%	**99.359.300**	100%	**93,77**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan***	100 orang	**105.965.350**	100 orang	**99.359.300**	100%	**93,77**

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023					
			Target		Realisasi		Capaian	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	100 orang	**105.965.350**	100 orang	**99.359.300**	100%	93,77
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	88%	**39.606.900**	100%	**31.582.000**	100%	**113,63 %**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	8 kegiatan	**39.606.900**	8 kegiatan	**31.582.000**	100%	**79,74 %**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	6 dokumen	30.596.700	6 dokumen	26.785.000	100 %	87,54 %
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen	9.010.200	2 dokumen	4.797.000	100 %	53,24 %

A. Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tribulan IV Tahun 2023 ini, di Kecamatan Jatikalen yang mempunyai kinerja hasil kinerja yang sudah bagus yakni diatas 70%. Dan Program yang mempunyai hasil paling rendah yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sekitar 66,74 %.

B. Analisis Realisasi Output Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Tribulan IV Tahun 2023 ini, rata-rata kinerja Kegiatan dan SubKegiatan hasilnya sudah bagus. Namun ada beberapa SubKegiatan yang hasil kinerjanya masih dibawah 50% atau RENDAH yakni :

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Hal ini terjadi karena OPD Pengampu di Kabupaten Nganjuk selaku Leading Sector tidak melaksanakan kegiatan pelatihan sehingga kinerja tidak tercapai maksimal
- Kegiatan Administrasi Umum Perangakt Daerah SugKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Hal ini terjadi karena frekuensi dan volume cetakan dan penggandaan sedikit, sehingga kinerja tidak tercapai maksimal.

C. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

Realisasi Keuangan sampai dengan Tribulan IV tahun 2023 atau per 30 Desember 2023 sebesar Rp1.766.858.290,- atau telah mencapai 69,24% yaitu dari anggaran sebesar Rp2.551.548.040,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata Program/Kegiatan/SubKegiatan sudah mempunyai serapan yang bagus yakni diatas 50 %.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	-	▪ Nilai target yang satuannya tidak sama dengan realisasi, sehingga tidak dapat dihitung secara tepat ▪ Kinerja/komitmen yang rendah sehingga tidak dapat bekerja sesuai tupoksinya
No.	**Sasaran Perangkat Daerah**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	-	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang masih berjalan kurang sederhana dan masih panjang
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	-	Pembuatan Laporan Kinerja ASN dan LKjIP yang belum sempurna
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Adanya kekompakan Tim dari Kecamatan dalam melakukan monev ke desa-desa	Kurang tertibnya desa terhadap tata kelola administrasi desa

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Mempunyai SOP yang jelas 2. Adanya pelayanan prima (excellent servis) kepada masyarakat 3. Kompetensi SDM khususnya petugas pelayanan	Kesediaan pelanggan dalam mengisi kuisioner
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Adanya sistem perencanaan yang efektif	Kurangnya data atau informasi yang akurat

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Daerah	dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Penggunaan sistem administrasi kepegawaian yang efisien untuk mengelola data dan proses administrasi	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi kepegawaian
	Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengadaan pakaian dinas dan atributnya	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	OPD Pengampu tidak mengadakan pelatihan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan penggandaan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Adanya anggaran yang memadai dapat memperlancar kinerja perjalanan dinas
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Kurang terjaganya arsip-arsip pada OPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memahami kebutuhan yang sesuai untuk meingkatkan efisiensi	Kurangnya pemahaman tentang teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang memadai	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Memahami bahwa kerja sama dengan instansi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Koordinasi memerlukan waktu dan sumber daya dan kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Konflik kepentingan antara instansi atau tingkat pemerintahan dapat menghambat sinergi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kecamatan	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja,

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		yang terlibat dalam pemberdayaan desa	dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semangat kerja sama dari semua pihak yang terlibat	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	-

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	elatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	-

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwewenang memerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan IV Tahun 2023 ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, diharapkan laporan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pad komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan agar tercipta pelayanan prima yang efektif dan efisien.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kecamatan Jatikalen Tribulan IV Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan

IV.2. Tindak Lanjut

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	▪ Nilai target yang satuannya tidak sama dengan realisasi, sehingga tidak dapat dihitung secara tepat ▪ Kinerja/komitmen yang rendah sehingga tidak dapat bekerja sesuai tupoksinya	▪ Menyamakan satuan target sehingga dapat dihitung secara tepat ▪ Adanya komitmen bersama antar stakeholder di Kecamatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dalam pelayanan yang masih berjalan kurang sederhana dan masih panjang	Mempersingkat dan memperpendek alur pelayanan
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Pembuatan Laporan Kinerja ASN dan LKjIP yang belum sempurna	Menyempurnakan Laporan Kinerja
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Kurang tertibnya desa terhadap tata kelola administrasi desa	Sering dilakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa terkait tata kelola administrasi desa secara terjadwal